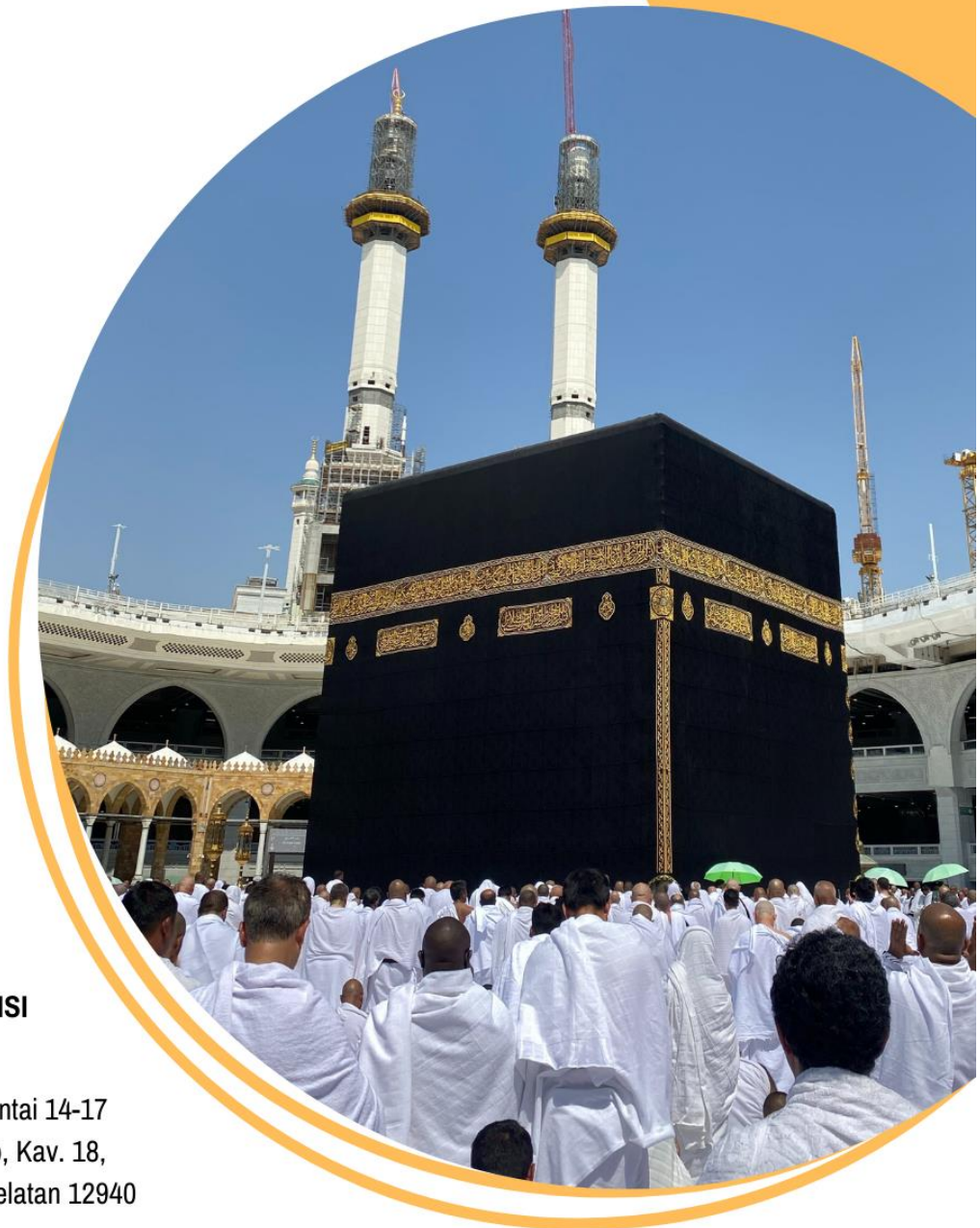


LAPORAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) UNTUK PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

2024

**BIDANG AKUNTANSI
DAN KEUANGAN**

Muamalat Tower, Lantai 14-17
Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. <i>Output dan Outcome</i>	3
1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Perkembangan Haji.....	4
2.2. Peraturan Kementerian Agama terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	5
2.3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	5
2.4. Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 - DJPb	7
BAB III METODOLOGI	10
3.1 Metode Perhitungan Standar Biaya Masukan.....	10
3.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	11
3.3 Rencana Kerja	13
BAB IV SURVEI HARGA DAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA TERKAIT ..	14
4.1 Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Agama RI	14
4.2 Rapat Koordinasi Bersama Ditjen PHU dan KJRI Jeddah	15
4.3 Rapat Koordinasi Bersama BPKH Limited di Makkah.....	16
4.4 Survei Harga Hotel dan Katering di Makkah	17
4.5 Survei Harga Katering di Madinah.....	20
4.6 Rapat Koordinasi Bersama Asosiasi Travel Haji dan Umroh.....	23
4.7 Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar	24
4.8 Kunjungan ke Embarkasi Makassar	28
4.9 Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya.....	34
4.10 Rapat Koordinasi di Kementerian Agama Kota Makassar.....	35
4.11 Kunjungan Pemilik Katering Jemaah Haji Embarkasi Sulawesi Selatan.....	36

BAB V STANDAR BIAYA OPERASIONAL HAJI.....	38
5.1 Pertumbuhan Ekonomi Global.....	38
5.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I dan II Tahun 2024	40
5.3 Peluang dan Tantangan Kedepan Di Tengah Risiko Ketidakpastian.....	42
5.4 Nilai Tukar Rupiah Berfluktuasi.....	44
5.5 Inflasi dan Daya Beli Masyarakat	47
5.6 Hasil Pengumpulan Data Kementerian Agama Dalam Penyusunan Standar Biaya Operasional Haji.....	50
5.7 Hasil Perhitungan Data Penetapan Besaran Asuransi Jiwa.....	51
5.8 Standar Biaya Penerbangan dan Proyeksi.....	53
5.9 Standar Biaya Akomodasi Hotel di Makkah	56
5.10 Standar Biaya Akomodasi Hotel di Madinah.....	62
5.11 Standar Biaya Akomodasi Jemaah Haji di Embarkasi	66
5.12 Standar Biaya Konsumsi di Arab Saudi	68
5.13 Simulasi Perhitungan Standar Biaya Layanan Masyair	73
BAB VI REKOMENDASI.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Perkembangan Jumlah Kuota Jemaah Haji Indonesia Periode 2014-2022.....	4
Gambar 2. 2	Perbandingan Beban BPIH dengan Pendapatan Setoran Bipih Jemaah Haji (Dalam Rp Juta)	6
Gambar 3. 1	Komponen BPIH	11
Gambar 4. 1	Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama Kementerian Agama RI.....	15
Gambar 4. 2	Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama PHU – KJRI Jeddah....	16
Gambar 4. 3	Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama BPKH Limited di Makkah	17
Gambar 4. 4	Dokumentasi Survei Hotel Razara Al Rawoha di Makkah.....	18
Gambar 4. 5	Dokumentasi Survei Hotel Al Kiswah Towers di Makkah	19
Gambar 4. 6	Dokumentasi Survei Aldamanhouri Katering di Makkah	19
Gambar 4. 7	Dokumentasi Survei Harga Wadi Ohud Katering di Madinah.....	21
Gambar 4. 8	Dokumentasi Survei Harga Noha Katering di Madinah.....	21
Gambar 4. 9	Dokumentasi Survei Harga Meez Mary Katering di Madinah.....	22
Gambar 4. 10	Simulasi Harga Akomodasi Penginapan.....	23
Gambar 4. 11	Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama Asosiasi Travel Haji dan Umroh	24
Gambar 4. 12	Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar	27
Gambar 4. 13	Lokasi Penerimaan Jemaah di Aula Arafah Makassar	29
Gambar 4. 14	Tempat Penginapan Jemaah di Wisma Jabal Uhud Makassar	30
Gambar 4. 15	Lokasi Manasik Haji di Makassar	31
Gambar 4. 16	Kondisi Dapur di Embarkasi Makassar	32
Gambar 4. 17	<i>Mockup</i> Pesawat Jemaah Haji	33
Gambar 4. 18	Kunjungan ke KUA Kecamatan Biring Karaya, Kota Makassar....	34
Gambar 4. 19	Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kementerian Agama, Kota Makassar	35
Gambar 4. 20	Dokumentasi Kunjungan ke Pemilik Katering Jemaah Haji di Sulawesi Selatan	37
Gambar 5. 1	Gambar Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2016–2025	39
Gambar 5. 2	Gambar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I dan II Tahun 2024	40

Gambar 5. 3	Gambar Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022-2024	41
Gambar 5. 4	Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2023 – Mei 2024 ...	45
Gambar 5. 5	Hasil <i>Forecasting</i> Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar (USD)	46
Gambar 5. 6	Perbandingan Inflasi Beberapa Negara <i>Year-on-Year</i> (persen), 2016–2023.....	47
Gambar 5. 7	Hasil Prediksi Inflasi Indonesia	49
Gambar 5. 8	Hasil Prediksi Inflasi Arab Saudi.....	50
Gambar 5. 9	Rincian Penyusunan Biaya Operasional Haji – BPIH	50
Gambar 5. 10	Kombinasi Biaya Penerbangan dengan Faktor Variasi Biaya Avtur dan Sewa Pesawat.....	55
Gambar 5. 11	Proyeksi Biaya Penerbangan Periode Tahun 2025 - 2030	56
Gambar 5. 12	Proses Penetapan HPS dan Sepakat Harga Calon Penyedia Akomodasi di Makkah.....	57
Gambar 5. 13	Wilayah Akomodasi Sepakat Harga	57
Gambar 5. 14	Peta Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Makkah	58
Gambar 5. 15	Rata-rata Biaya Akomodasi Makkah per Wilayah	59
Gambar 5. 16	Standar Biaya Akomodasi Hotel di Makkah	60
Gambar 5. 17	Sebaran Akomodasi Hotel di Madinah.....	62
Gambar 5. 18	Proses Penetapan HPS dan Sepakat Harga Calon Penyedia Akomodasi di Madinah.....	64
Gambar 5. 19	Penempatan JHI Akomodasi di Madinah	64
Gambar 5. 20	Wilayah Akomodasi Sepakat Harga di Madinah	65
Gambar 5. 21	Proyeksi Biaya Akomodasi di Embarkasi Tahun 2025-2030	68
Gambar 5. 22	Hasil Proyeksi Biaya Makan di Arab Saudi	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	13
Tabel 4. 1	Komponen Pembentuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	14
Tabel 5. 1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (Persen), 2024 - 2025.....	43
Tabel 5. 2	Proyeksi Kurs USD dan SAR Tahun 2025-2030	46
Tabel 5. 3	Proyeksi Inflasi Negara Arab Saudi (KSA) dan Indonesia (INA).....	48
Tabel 5. 4	Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berdasarkan Embarkasi Sesuai Ketetapan Haji 2024	52
Tabel 5. 5	Hasil Perhitungan Aktuarial	52
Tabel 5. 6	Detail komponen Biaya Penerbangan Haji	53
Tabel 5. 7	Biaya Avtur Malaysia, Singapura dan Indonesia	53
Tabel 5. 8	Perhitungan Biaya Avtur Indonesia	54
Tabel 5. 9	Simulasi Perhitungan Biaya Avtur Indonesia.....	54
Tabel 5. 10	Simulasi Perhitungan Biaya Sewa Pesawat Indonesia	54
Tabel 5. 11	Faktor Komponen Biaya Penerbangan	55
Tabel 5. 12	Proyeksi Biaya Penerbangan Periode Tahun 2025 - 2030	56
Tabel 5. 13	Rekapitulasi Penetapan HPS Calon Penyedia Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 1444 H/2023 M	56
Tabel 5. 14	Data Sebaran Jemaah Haji Indonesia per Wilayah Tahun 2019-2023.....	58
Tabel 5. 15	Simulasi Penempatan Jemaah Haji berdasarkan Wilayah	59
Tabel 5. 16	Hasil Proyeksi Biaya Akomodasi Hotel di Makkah Tahun 2025 – 2030.....	61
Tabel 5. 17	Penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Akomodasi di Madinah Tahun 1444H/2023M.....	62
Tabel 5. 18	Rekapitulasi Penetapan HPS Calon Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 1444 H/2023 M	63
Tabel 5. 19	Asumsi Penempatan Jemaah Haji di Madinah	63
Tabel 5. 20	Biaya HPS Hotel di Madinah	63
Tabel 5. 21	Proyeksi Standar Biaya Akomodasi di Madinah Tahun 2025 -2030	65
Tabel 5. 22	Hasil Proyeksi BPIH di Madinah Tahun 2025 – 2030	66
Tabel 5. 23	Biaya Akomodasi Jemaah Haji di Embarkasi	66
Tabel 5. 24	Rataan Harga Hotel Bintang-2 di Wilayah Jakarta, Makassar dan Medan	67

Tabel 5. 25 Rentang Biaya Akomodasi di Embarkasi	67
Tabel 5. 26 Proyeksi Biaya Akomodasi di Embarkasi Tahun 2025-2030.....	67
Tabel 5. 27 Menu Makan Pagi Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023 ..	69
Tabel 5. 28 Menu Makan Siang Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023.....	69
Tabel 5. 29 Menu Makan Malam Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023.....	70
Tabel 5. 30 Menu Makan Pagi Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023.....	70
Tabel 5. 31 Menu Makan Siang Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023.....	71
Tabel 5. 32 Menu Makan Malam Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023.....	71
Tabel 5. 33 Hasil Proyeksi Biaya Makan Untuk Kategori Sarapan Pagi.....	72
Tabel 5. 34 Proyeksi Standar Biaya Makan Siang dan Makan Malam berdasarkan Proyeksi Inflasi Tahun 2025-2030	72
Tabel 5. 35 Simulasi Perhitungan Standar Biaya Layanan Masyair.....	73
Tabel 5. 36 Proyeksi Biaya Akomodasi Layanan Masyair Tahun 2025-2030	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga negara yang didirikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Sebagai lembaga yang mengelola Keuangan Haji, BPKH bertanggung jawab untuk memastikan pembiayaan bagi penyelenggaraan ibadah haji tersedia. Salah satu pengeluaran keuangan haji yang dilakukan adalah untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Proses penetapan BPIH dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Usulan awal BPIH oleh Kementerian Agama kepada DPR RI.
2. Pembahasan usulan BPIH di DPR RI bersama Kementerian Agama.
3. Penetapan BPIH oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden.

BPIH terdiri dari dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah haji, dan Nilai Manfaat (NM) yang bersumber dari hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan BPIH antara lain kurs mata uang asing (USD dan SAR), biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya hidup, biaya layanan haji, dan Nilai Manfaat.

Berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada tanggal 27 November 2023, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445H/2024 M sebesar Rp93,4 Juta per jemaah yang terdiri dari Bipih sebesar Rp56,04 juta (60% dari BPIH) dan NM sebesar Rp37,36 juta (40% dari BPIH). Sehingga, jemaah haji hanya perlu membayar Rp31,04 juta setelah dipotong setoran awal sebesar Rp25 juta.

Dengan pertimbangan besaran BPIH selalu bergerak (cenderung meningkat) setiap tahunnya, dan atas dasar kesepakatan diskusi dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, maka perlu disusun sebuah Standar Biaya Masukan (SBM) sebagai dasar penyusunan BPIH yang lebih terukur dan rasional dengan mempertimbangkan Nilai Manfaat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian menyeluruh mengenai

penyusunan SBM dalam perhitungan BPIH yang akan digunakan sebagai masukan dan perhitungan dalam membuat proyeksi pengeluaran BPIH terutama penggunaan Nilai Manfaat (NM).

Dalam diskusi yang dilakukan antara BPKH dengan DJPHU Kemenag disepakati perlunya disusun sebuah SBM dalam menghitung proyeksi BPIH untuk dapat memperkirakan biaya BPIH yang berasal dari NM yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana haji. Hasil penyusunan SBM dalam perhitungan BPIH diharapkan bisa juga digunakan oleh DJPHU dan BPKH dalam membuat proyeksi anggaran BPIH.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- c. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, 27 November 2023.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M dan Penggunaan Nilai Manfaat.
- e. Surat Ditjen PHU Kementerian Agama RI nomor B10026/DJ/Dt.II.V.2/KU.02/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permintaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**”, adalah:

a. Maksud

Menyusun draft standar biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam membuat proyeksi pengeluaran BPIH.

b. Tujuan

1. Tersedianya draft standar biaya untuk menghitung biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu masukan dalam menghitung proyeksi pengeluaran untuk transfer BPIH.
2. Memberikan kemudahan kepada BPKH untuk menghitung kebutuhan BPIH, terutama komponen Bipi dan NM yang terukur dan rasional.

1.4. *Output dan Outcome*

a. *Output:*

Output dari pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**” adalah:

- 1 set dokumen draft SBM untuk biaya per komponen BPIH; dan
- 1 set dokumen perhitungan atas komposisi Bipih dan Nilai Manfaat.

b. *Outcome:*

Outcome dari pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**” adalah sebagai *tools* yang akan digunakan oleh BPKH untuk menghitung kebutuhan BPIH, terutama komponen Bipih dan NM yang terukur dan rasional.

1.5. *Ruang Lingkup Pekerjaan*

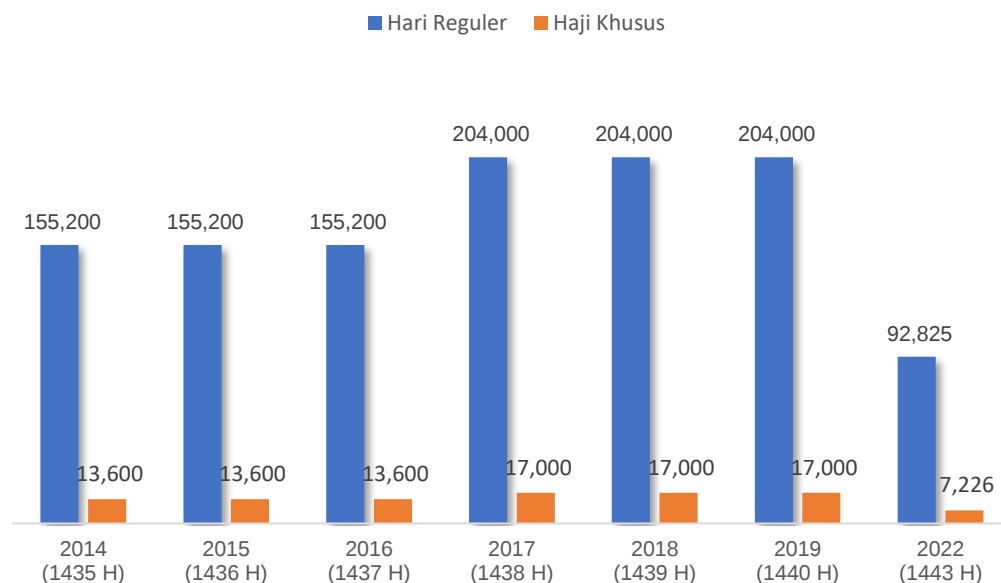
Ruang lingkup dari pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**” meliputi:

- a) Menyusun struktur komponen BPIH yaitu membuat gambaran komprehensif masing-masing komponen pembentuk BPIH.
- b) Menyusun standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH dengan melakukan pengumpulan data pendukung/referensi antara lain berasal dari Kementerian Agama RI, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/*Travel Agent*, atau sumber-sumber lain yang valid untuk menyusun standar biaya masukan atas komponen pembentuk BPIH berdasarkan struktur biaya BPIH termasuk terkait risiko yang mungkin timbul.
- c) Melakukan *benchmark* standar biaya ke daerah/embarkasi dan di KSA dengan cara mengadakan diskusi dan koordinasi bersama Kementerian Agama RI, beberapa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/*Travel Agent* untuk mendapatkan gambaran mengenai standar biaya penyelenggaraan haji/umrah, dan bersama-sama dengan BPKH akan melakukan *benchmark/site visit* secara *sampling* ke beberapa embarkasi dan di Arab Saudi atas komponen biaya yang dianggap memiliki perbedaan biaya signifikan.
- d) Melakukan perhitungan formula BPIH dengan menyiapkan formula perhitungan pembentuk BPIH yang berasal dari struktur komponen BPIH (Bipih dan NM) dan standar biaya masukan untuk komponen pembentuk, hingga dapat menghasilkan persentase Bipih dan NM.
- e) Menyampaikan laporan akhir berupa standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH serta formulasi perhitungan Bipih dan Nilai Manfaat yang akan menghasilkan nominal BPIH.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Haji

Bagi muslim, haji merupakan ibadah wajib, apalagi jika tergolong memiliki kemampuan fisik dan materi. Haji adalah bagian penting dari Rukun Islam, berada di urutan kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Pelaksanaan ibadah haji bersifat tahunan, yaitu hanya terjadi pada bulan Dzulhijjah atau tepatnya antara tanggal 8-12 Dzulhijjah. Bagi masyarakat di Indonesia, pelaksanaan ibadah haji senantiasa memberikan pengalaman rohani yang berarti, dan pada saat kembali ke Indonesia akan menaikkan posisi tawar sosial di masyarakat, mengingat tidak setiap orang mampu berhaji. Itu sebabnya, minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Kuota Jemaah Haji Indonesia Periode 2014-2022

Sumber: Keputusan Menteri Agama

Pada Gambar 2.1, tidak ditampilkan data tahun 2020 dan 2021, mengingat Pemerintah melalui Menteri Agama ketika itu, menerbitkan Keputusan Menteri Agama yang membatalkan seluruh keberangkatan jemaah haji karena situasi dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Mulai tahun 2022, penyelenggaraan ibadah haji secara bertahap kembali pada kondisi normal.

2.2. Peraturan Kementerian Agama terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai penyediaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Peraturan yang berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Barang/Jasa Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 339 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 340 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 340 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M dan Penggunaan Nilai Manfaat.
7. Surat Ditjen PHU Kementerian Agama RI nomor B10026/DJ/Dt.II.V.2/KU.02/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permintaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

2.3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

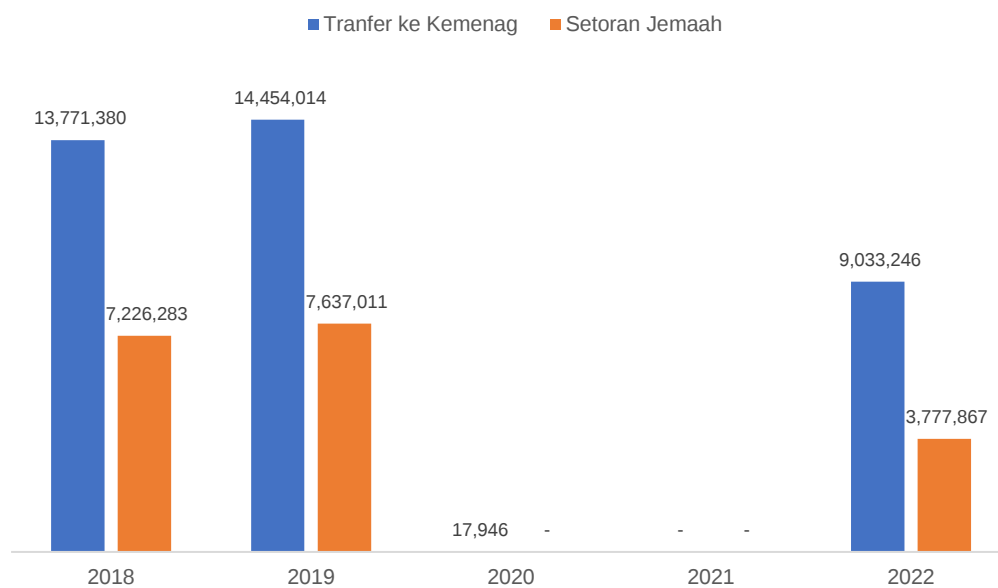
Sebagai lembaga yang mengelola Keuangan Haji, BPKH bertanggung jawab untuk memastikan pembiayaan bagi penyelenggaraan ibadah haji tersedia. Salah satu pengeluaran keuangan haji yang dilakukan adalah untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Proses penetapan BPIH dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Usulan awal BPIH oleh Kementerian Agama kepada DPR RI.
2. Pembahasan usulan BPIH di DPR RI bersama Kementerian Agama.
3. Penetapan BPIH oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden.

BPIH terdiri dari dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah haji, dan Nilai Manfaat (NM) yang bersumber dari hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan BPIH antara

lain kurs mata uang asing (USD dan SAR), biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya hidup, biaya layanan haji, dan Nilai Manfaat.

Bagi BPKH, terdapat konsekuensi ketika kuota haji telah ditetapkan oleh Menteri Agama, dimana harus menyiapkan sejumlah dana yang bersumber dari Keuangan Haji yang dikelolanya, untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, termasuk membiayai selisih antara BPIH dengan Bipih. Berdasarkan data laporan keuangan BPKH periode 2018-2022, tercatat, setiap tahun BPKH harus mentransfer BPIH ke Kementerian Agama dalam jumlah cukup besar.



Gambar 2. 2 Perbandingan Beban BPIH dengan Pendapatan Setoran Bipih Jemaah Haji (Dalam Rp Juta)

Sumber: Laporan BPKH 2018-2022

Pada Gambar 2.2, dapat terlihat bahwa sepanjang periode 2018-2022, terdapat selisih yang cukup besar antara pendapatan yang diperoleh dari setoran Bipih jemaah haji, dengan beban BPIH yang harus dikeluarkan oleh BPKH melalui Kementerian Agama. Selisih antara keduanya menjadi beban yang harus dibiayai oleh BPKH. Hal ini kemudian menjawab mengapa BPKH dituntut atas pengembangan Keuangan Haji, selain agar Bipih senantiasa terjangkau oleh masyarakat, juga untuk memastikan keberlangsungan Keuangan Haji itu sendiri dalam jangka panjang agar pembiayaan BPIH tetap ter-cover dari Nilai Manfaat yang diperoleh, tidak sampai menggerus Dana Abadi Umat.

Berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada tanggal 27 November 2023, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445H/2024 M sebesar Rp93,4 Juta per jemaah yang terdiri dari Bipih sebesar Rp56,04 juta (60% dari BPIH) dan NM sebesar Rp37,36

juta (40% dari BPIH). Sehingga, jemaah haji hanya perlu membayar Rp31,04 juta setelah dipotong setoran awal sebesar Rp25 juta.

Dengan pertimbangan besaran BPIH selalu bergerak (cenderung meningkat) setiap tahunnya, dan atas dasar kesepakatan diskusi dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, maka perlu disusun sebuah Standar Biaya Masukan (SBM) sebagai dasar penyusunan BPIH yang lebih terukur dan rasional dengan mempertimbangkan Nilai Manfaat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian menyeluruh mengenai penyusunan SBM dalam perhitungan BPIH yang akan digunakan sebagai masukan dan perhitungan dalam membuat proyeksi pengeluaran BPIH terutama penggunaan Nilai Manfaat (NM). Hasil penyusunan SBM dalam perhitungan BPIH diharapkan bisa juga digunakan oleh DJPHU dan BPKH dalam membuat proyeksi anggaran BPIH.

2.4. Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 - DJPb

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Standar Biaya Masukan (SBM) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Standar Biaya Masukan (SBM) berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi biaya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi yaitu:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Harang Milik Negara
7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan
8. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian
9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi
12. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil
13. Satuan Biaya Operasional Penyuluh
14. Honorarium Rohaniwan
15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
16. Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, Senior *Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional
18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional
20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI
22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
24. Biaya Paket Data dan Komunikasi
25. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri
26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
31. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)
33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan
36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi yaitu:

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)
2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)
3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan
6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri
7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi
8. Honorarium Narasumber Pakar/ Praktisi/ Profesional
9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia
11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan
12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diktat)

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri
14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru
15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri
17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

BAB III METODOLOGI

Pada bagian ini, akan disampaikan metode pelaksanaan pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**”. Dalam bagian ini juga akan disampaikan beberapa hal yang menjadi inovasi yang kami tawarkan di dalam penyusunan kajian ini, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada BPKH untuk menghitung kebutuhan BPIH, terutama komponen Bipih dan NM yang terukur dan rasional.

3.1 Metode Perhitungan Standar Biaya Masukan

Metode perhitungan standar biaya dilakukan dengan pendekatan rumus persamaan harga maksimum suatu produk. Penentuan harga maksimum suatu produk dilakukan dengan mengumpulkan seluruh harga untuk produk sejenis dan merek sejenis untuk mendapatkan nilai standar deviasi dari harga produk sehingga dapat digunakan sebagai standar biaya maksimum produk tersebut. Secara umum perhitungan standarisasi harga dapat diuraikan sebagai berikut:

$$P_{maks} = M_{aks}^n O_{ijkl}$$

keterangan

- P_{maks} : Harga maksimum suatu produk
 i : Harga pada pengecer (*outlet*)
 j : Hipermarket
 k : Mini market
 l : Pegadang khusus

Data yang terpilih sebagai harga eceran tertinggi akan dipergunakan sebagai sampel untuk memprediksi harga yang akan menjadi acuan pada proses penganggaran untuk tahun 2025. Sedangkan faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi harga barang tersebut antara lain:

1. inflasi “*Year on Year*” (YoY) yang berguna untuk melihat tren kenaikan harga antar tahun di bulan yang sama;
2. koefisien penimbang keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. Pajak (PPN dan PPH) sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen).

$$P_n = P_{n-1} + P_{n-1} V_n + P_{n-1} V_p$$

P_n = Prediksi Harga pada tahun ke- n

P_{n-1} = Harga yang berlaku pada tahun berjalan

V_n = Laju Inflasi pada prediksi tahun ke- n

V_p = Profit

3.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Desk Study

Desk study adalah Studi pendahuluan ini juga lazim dikenal dengan istilah *desk study*, dimana tim penyusun kajian akan menginventarisasi sebanyak-banyaknya data sekunder sebagai pendukung untuk memperkuat analisis kajian dan menyusun kajian kerangka kajian awal termasuk *timeline* pekerjaan

2. Penyusunan Komponen BPIH

Penyusunan komponen BPIH dilakukan dengan membuat gambaran komprehensif masing-masing komponen pembentuk BPIH. Komponen BPIH dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. 1 Komponen BPIH

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode survei dan *Focus Group Discussion (FGD)* antara lain:

- Survei harga pasar wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur
- Survei harga pasar di Arab Saudi untuk mendapatkan *benchmark* atas komponen biaya yang dianggap memiliki perbedaan biaya signifikan.
- FGD dengan Kementerian Agama (PHU), BPKH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/Asosiasi *Travel Agent* untuk mendapatkan gambaran mengenai standar biaya penyelenggaraan haji.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

- Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi biaya antara lain Pertumbuhan Ekonomi (Makro), Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), Kurs (USD, SAR) yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan media cetak lainnya;
- Daftar harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik atau agen/distributor;
- Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di daerah;
- Harga kontrak untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor fluktuasi harga yang terjadi;
- Data buku teks lainya/internet yang dianggap dapat dipergunakan.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan selesai diinventarisasi. Data-data tersebut akan diolah untuk mendapatkan formula perhitungan BPIH. Adanya formula perhitungan pembentuk BPIH yang berasal dari struktur komponen BPIH (Bipih dan NM) dan standar biaya masukan untuk komponen pembentuk, hingga dapat menghasilkan persentase Bipih dan NM.

5. Penyusunan Standard Harga Satuan Barang dan Jasa

Penyusunan Standar Harga Satuan *Barang/Jasa* dilakukan metode kegiatan sebagai berikut:

- Mempelajari dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Menyiapkan kelengkapan perijinan untuk kegiatan Survei dan data awal dari pemberi pekerjaan;
- Menentukan lokasi, sasaran serta cara Survei yang paling cepat dan tepat;
- Melakukan koordinasi PHU dan BPKH untuk menyamakan pemahaman atas jenis/spesifikasi barang/jasa yang akan di Survei.
- Melakukan kegiatan Survei dengan ketetapan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja;
- Melakukan klasifikasi, analisa dan kajian harga satuan barang hasil pelaksanaan Survei;
- Melakukan evaluasi atas hasil klasifikasi dan analisa harga hasil Survei;
- Melakukan pencarian data nilai TKDN barang yang sudah di publikasikan oleh Kementerian Perindustrian.
- Menetapkan harga satuan barang teranalisa;

- Melakukan proses data entri dari hasil data yang sudah teranalisa ke dalam data base/web base;
- Pembuatan laporan hasil data entri sesuai kelompok barang atau sub kelompok barang;
- Melakukan evaluasi hasil data entri sesuai subkelompok barang bersama pengguna jasa;
- Menyusun dan menyerahkan laporan Pendahuluan, bulanan dan laporan akhir kepada pengguna jasa dan mencetak database hasil data entri sebagai lampiran.

6. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan yang berisi hasil standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH serta formulasi perhitungan Bipih dan Nilai Manfaat yang akan menghasilkan nominal BPIH.

3.3 Rencana Kerja

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan “**Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**” selama 60 hari kalender. Pekerjaan dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Pekerjaan	Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan laporan pendahuluan								
2	Persiapan survei								
3	Pelaksanaan Survei & Pengumpulan Data								
4	Rapat Koordinasi PHU dan BPKH								
5	Site visit ke Arab Saudi								
6	Koordinasi bersama PHU, KJRI Jeddah, BPKH Limited								
7	Koordinasi bersama Asosiasi Travel Haji dan Umroh								
8	Site visit ke wilayah Sulawesi								
9	Pengolahan Data								
10	Rapat Progres								
11	Laporan final hasil penyusunan SBM								

BAB IV SURVEI HARGA DAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA TERKAIT

Survei harga dan koordinasi dengan lembaga terkait merupakan bagian dari tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Survei harga dan koordinasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

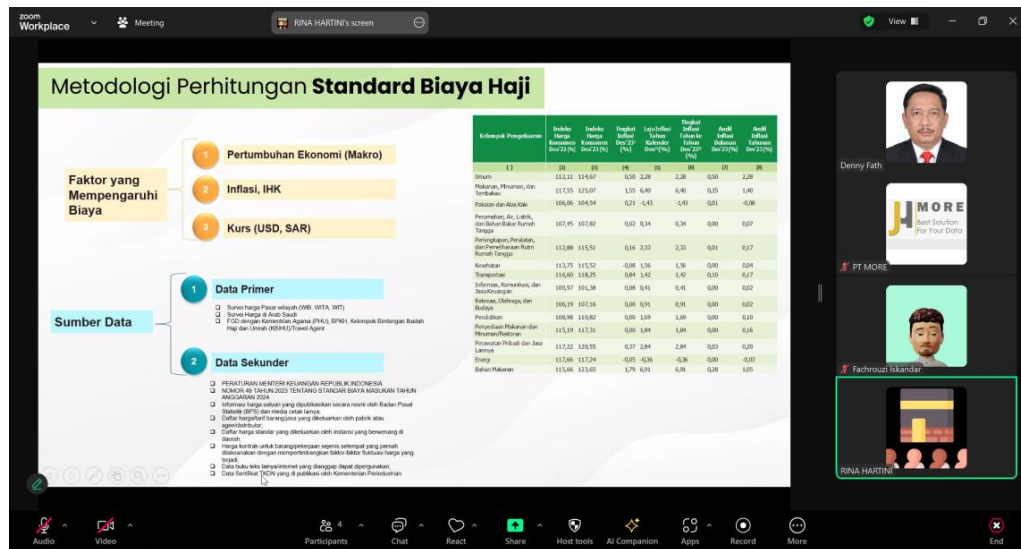
4.1 Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Agama RI

Rapat koordinasi bersama Kementerian Agama RI dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui *zoom meeting*. Hasil rapat antara lain merinci komponen-komponen pembentuk biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Komponen Pembentuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

No	Rincian Komponen BPIH
1	Akomodasi Makkah
2	Akomodasi Madinah
3	Konsumsi Jemaah di Makkah
4	Konsumsi Jemaah di Madinah
5	Konsumsi Jemaah Haji Terpisah
6	Transportasi Antar Kota Perhajian - Naqobah (GSF)
7	Transportasi Shalawat (Angkutan Jemaah dari Pemondokan ke Masjidil Haram PP)
8	Transportasi Safari Wukuf
	1) Posisi Duduk Normal
	2) Posisi Jemaah Baring
9	Pelayanan Pengangkutan Barang Jemaah
	1) Biaya Angkut Bagasi (pisah hotel)
	2) Pengangkutan Bagasi Jemaah Haji dari Bandara ke Hotel
	3) Pengangkutan Kelebihan Bagasi Kloter Jemaah Haji
10	Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina
	a) Paket Layanan Masyair
11	Pelindungan
	a) Penanganan dan Perawatan Jemaah Sakit pasca operasional dan pemakaman jemaah wafat
	b) Asuransi Kesehatan
12	Dokumen Jemaah Haji (Visa)
13	Pembinaan Jemaah Haji di Arab Saudi - Badal Haji
14	Pelayanan Umum di Arab Saudi
	a) Pelayanan Penamaan dan Penomoran Tenda Jemaah Haji di Arafah Mina
	b) Pelayanan Penamaan dan Penomoran Akomodasi Jemaah Haji Indonesia
	c) Pelayanan Penamaan dan Penomoran Bus Jemaah Haji Indonesia
	d) Perlengkapan Jemaah Haji Terpisah dan/atau sakit
	e) Pelayanan Wrapping Kursi Roda Jemaah Haji Masa Kepulangan
	f) Biaya administrasi lainnya
	g) Biaya Transportasi dan Komunikasi

No	Rincian Komponen BPIH
	h) Pengadaan Saranan dan Prasaranan Pendukung Operasional Haji
	i) Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Operasional Haji
15	Pengelolaan BPIH
	Pengelolaan Keuangan pada Kantor Urusan Haji (KUJ) di Arab Saudi



Metodologi Perhitungan Standard Biaya Haji

Faktor yang Mempengaruhi Biaya

1. Pertumbuhan Ekonomi (Makro)
2. Inflasi, IHK
3. Kurs (USD, SAR)

Sumber Data

1. Data Primer
 - Survei harga Pasar wilayah (PMP, WPP, WPT)
 - Survei harga di Arab Saudi
 - FGD dengan Kementerian Agama (KEMAG), BPNH, Kelompok Bimbingan Badan Haji dan Umrah (BKBH) Travel Agent
2. Data Sekunder
 - PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA ANDALAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
 - Konfirmasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan media cetak lainnya
 - Daftar tarif/tarif/tarif yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terkait
 - Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di daerah
 - Harga kontrak untuk barang/jasa yang pernah ditetapkan yang pernah ditetapkan dengan persetujuan/keputusan Badan Standar Nasional Harga yang berlaku
 - Data harga/kegiatan yang diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan
 - Data statistik/kegiatan yang dipublikasikan oleh instansi/lembaga terkait

Kategori Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen (IHK) 2023	Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024	Tingkat Inflasi (IHK 2024 - IHK 2023) (%)	Indeks Harga Konsumen (IHK) 2023	Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024	Tingkat Inflasi (IHK 2024 - IHK 2023) (%)
1.1. Umrah	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.1. Makanan, Minuman, dan Tambahan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.2. Pakan dan Akasik	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Sewa Kamar Rumah Tinggal	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.4. Perawatan, Perawatan, dan Perawatan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.5. Transportasi	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.6. Telekomunikasi, dan Sewa	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.7. Pendidikan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.8. Perawatan, Perawatan, dan Perawatan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.9. Perawatan, Perawatan, dan Perawatan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.10. Energi	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09
1.1.11. Bahan Makanan	122,12	124,67	2,09	122,12	124,67	2,09

Gambar 4. 1 Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama Kementerian Agama RI

4.2 Rapat Koordinasi Bersama Ditjen PHU dan KJRI Jeddah

Penyelenggaraan rapat koordinasi antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024. Hasil rapat antara lain:

1. Dalam penentuan SBM, perlu mempertimbangkan faktor penentu harga:
 - Kuota
 - Kelayakan
 - Risiko
 - Ekonomi Makro (Kurs, Inflasi)
2. Penentuan variabel yang paling sensitif terhadap proyeksi harga kedepan
3. Penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sangat bergantung kepada hasil keputusan akhir DPR dalam menyetujui harga per komponen untuk biaya penyelenggaraan Haji. Setelah ditetapkan, lalu PHU melakukan justifikasi untuk HPS.
4. Untuk menentukan komponen harga ada yang bersifat sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu Transportasi dan Layanan Masyair. Selain itu komponen harga yang bersifat tidak tetap (berubah) dan dapat diatur sesuai dengan keputusan akhir DPR.
5. Perlunya dibuat standardisasi harga agar tidak bergantung kepada hasil keputusan pembahasan di DPR dengan metode ilmiah berdasarkan harga kontrak bukan dari HPS.

6. Perlu ada kerja sama dengan BPKH Limited dalam penentuan komponen harga.



Gambar 4. 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama PHU – KJRI Jeddah

4.3 Rapat Koordinasi Bersama BPKH Limited di Makkah

Rapat koordinasi bersama BPKH Limited di Makkah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024. Berdasarkan hasil rapat, BPKH Limited akan melakukan:

1. Penyediaan bumbu masak untuk seluruh catering Haji
2. Penyediaan makanan siap saji untuk 3500 Jemaah Haji
3. Skenario *Land Agreement* Hotel Makkah dan Madinah (kontrak)
4. BPKH Limited melakukan kontrak pada akomodasi selama beberapa tahun, sehingga PHU bisa berkontrak langsung dengan BPKH Limited dengan harga yang konstan.



Gambar 4. 3 Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama BPKH Limited di Makkah

4.4 Survei Harga Hotel dan Katering di Makkah

Survei harga hotel dan katering di Makkah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus 2024. Hasil kegiatan survei antara lain:

1. Survei Katering Aldamanhouri:
Rataan harga katering untuk Indonesia sebesar SAR 43. Rataan harga katering tertinggi yaitu Nigeria sebesar SAR 65 (isi katering dominan daging). Rataan harga katering terendah yaitu Afganistan sebesar SAR 24.
2. Survei Hotel Al Kiswah Tower:
 - Sedang ada renovasi di dua tower
 - 3 dari 5 tower disediakan untuk Jemaah Haji Indonesia

- Jarak yang dekat dengan Masjid Haram membuat harga tinggi dengan rata-rata sebesar SAR 4000 sampai dengan SAR 4500 (harga per *bed* selama di musim Haji)
 - Kenaikan harga karena inflasi di Arab Saudi diprediksi akan naik sekitar 5%-10%.
3. Survei Hotel Razana, salah satu Hotel yang buka di Sektor 5 (*low season*)
 - 4 *Bed* – SAR 160
 - 3 *Bed* – SAR 140
 - 2 *Bed* – SAR 120
 - Full *booked* Ramadhan
 4. Survei Harga Makanan Resto Malaysia
 - Nasi Ayam: SAR 28
 - Nasi Kambing: SAR 35
 - Harga makanan tersebut memiliki porsi untuk lebih dari 1 orang



Gambar 4. 4 Dokumentasi Survei Hotel Razara Al Rawoha di Makkah



Gambar 4. 5 Dokumentasi Survei Hotel Al Kiswah Towers di Makkah



Gambar 4. 6 Dokumentasi Survei Aldamanhoury Katering di Makkah

4.5 Survei Harga Katering di Madinah

Survei harga katering di Madinah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024. Survei harga katering dilakukan diberbagai tempat antara lain:

1. Wadi Ohud Katering
 - Info tahun depan akan menaikkan harga katering dari SAR 43 bisa mencapai SAR 45 sampai SAR 47.
 - Gudang penyimpanan memiliki kapasitas yang dapat melayani 20000 Jemaah Haji dan Umroh
 - Ar-mina untuk Indonesia (500 Riyal), Malaysia (400 Riyal) lebih murah karena malaysia membawa makanan siap saji dari negaranya dan hanya memanaskan di Madinah.
2. Noha Katering
 - Bisnis sudah berjalan 15 Tahun
 - Melayani katering Haji dan Umroh
 - Melayani 12500 Jemaah tahun 2024
 - Harga katering Haji tahun 2024 sebesar SAR 43
 - Harga pada tahun 2023 sebesar SAR 28 (sarapan SAR 8, Siang SAR 10, Malam SAR 10)
 - NOHA bagian dari syarikah yang terdiri atas tiga katering besar
3. Meez Mary Katering
 - Bisnis sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun
 - Melayani catering Haji dan Umroh
 - Melayani 8000 Jemaah tahun 2024
 - Harga catering haji sesuai (SAR 43)
 - Mendapatkan peringkat pertama kepuasan atas pelayanan katering di Madinah tahun 2024 (Excelent)

Berdasarkan hasil survei harga katering di Madinah, sebaiknya kontrak dengan katering dilakukan maksimal satu bulan sebelum musim Haji, hal tersebut dilakukan karena dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pokok untuk makanan. Pihak *counterpart* di Arab Saudi dapat turut memantau hasil keputusan RDP dari DPR. Harapannya penetapan harga bisa dilakukan jauh hari untuk menghindari kenaikan harga bahan pokok makanan.



Gambar 4. 7 Dokumentasi Survei Harga Wadi Ohud Katering di Madinah



Gambar 4. 8 Dokumentasi Survei Harga Noha Katering di Madinah

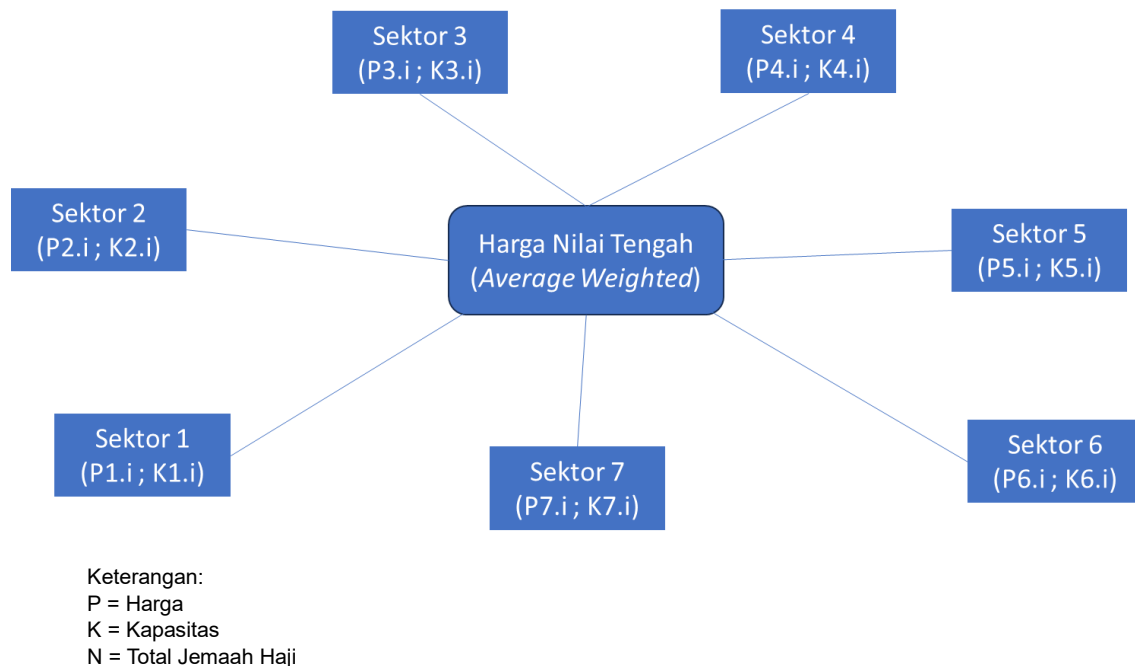


Gambar 4. 9 Dokumentasi Survei Harga Meez Mary Katering di Madinah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di Arab Saudi, untuk menentukan komponen harga ada yang bersifat *Given* (sudah ditetapkan) oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu Transportasi dan Layanan Masyair. Untuk komponen harga lainnya bersifat variabel (berubah) dan dapat diatur sesuai dengan keputusan akhir DPR RI. Faktor paling berperan dalam kenaikan harga setiap tahunnya adalah faktor inflasi di Arab Saudi kisaran 5% - 10% yang berdampak kepada kenaikan upah pekerja, sehingga berpengaruh terhadap biaya akomodasi dan katering. Dengan adanya usulan Syarikat dalam penyedia penyelenggaraan Haji, bisa berdampak positif dalam hal persaingan harga, namun hal negatifnya adalah harga akan menjadi lebih tinggi karena PHU tidak berkontrak langsung dengan pihak pertama melainkan melalui Syarikat.

Harga Akomodasi lebih tinggi pada musim haji, karena sebagian besar penginapan dan katering hanya melayani pada musim haji saja. Variasi harga hotel disekitaran Masjidil Haram dengan wilayah terdekat memiliki harga lebih tinggi dan untuk wilayah yang lebih jauh memiliki harga lebih murah. Hal tersebut akan menentukan nilai standar harga dengan pendekatan model pembobotan dan simulasi. Faktor penentu standar harga hotel antara lain:

1. Harga per *Bed* (saat ini (t)) dan sebelumnya (t-1)
2. Kapasitas Hotel
3. Total Jemaah
4. Jarak Hotel / Sektor Hotel
5. Kondisi Makro Ekonomi Arab Saudi (Kurs, Inflasi, Pajak, dll)
6. Faktor lainnya (*Fairness, Sustainability, Proyeksi Kenaikan Harga, dll*).



Gambar 4. 10 Simulasi Harga Akomodasi Penginapan

Variasi data harga yang diperoleh berdasarkan hasil survei di Arab Saudi antara lain:

- Akomodasi Makkah SAR 4230 yang terdiri dari penginapan di Makkah, dan paket layanan Masyair.
- Biaya konsumsi di Makkah dan Madinah masing-masing sebesar SAR 43 yang terdiri dari sarapan sebesar SAR 10, makan siang sebesar SAR 16,5, makan malam sebesar SAR 16,5.
- Akomodasi penginapan di Madinah sebesar SAR 1325.
- Layanan Masyair untuk transportasi sudah bersifat tetap dari Arab Saudi.

4.6 Rapat Koordinasi Bersama Asosiasi Travel Haji dan Umroh

Rapat koordinasi bersama asosiasi travel haji dan umroh dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 di Graha Beka (SMC Group), Babul Ka'bah, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil rapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Informasi biaya umroh tergantung dari musim ibadah/*high season*, umumnya Desember-Januari tergolong memiliki biaya tinggi. Selain itu juga pada saat Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Bulan Ramadhan memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan hari biasanya. Peningkatan biaya bisa 10%-15% pada *high season*.
2. Hotel bintang 5 umumnya memiliki rata-rata harga sebesar SAR 1350 – SAR 1600 / room / night / 4 bed. Hotel di Makkah yang paling murah sebesar SAR 800 / room / night / 4 bed.
3. Transportasi 1 paket bis memiliki rata-rata harga sebesar SAR 60.000.

4. Biaya konsumsi untuk jemaah umroh khusus memiliki rata-rata harga sebesar SAR 150 / orang.
5. Pada saat musim haji umumnya biaya akan naik 3 kali lipat dari biaya biasanya.



Gambar 4. 11 Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama Asosiasi Travel Haji dan Umroh

4.7 Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar

Rapat koordinasi dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar (Kanwil Kemenag Makassar) pada tanggal 23 September 2024, bersama Bapak Ikbal Ismail selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Makassar bersama jajaran, serta Bapak Deny selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji (PAOPAH) beserta jajaran. Hasil rapat antara lain:

1. Anggaran BPIH dalam Negeri yang ada di wilayah / embarkasi bersumber dari BPIH (Nilai Manfaat), APBN, dan bersumber dari swadaya UPT.
2. Penyusunan Standar Biaya BPIH adalah kolaborasi antara BPKH dengan DJPHU Kementerian Agama.
3. Beberapa komponen yang memerlukan standar biaya antara lain honor nara sumber untuk kegiatan manasik. Hal ini dikarenakan belum ada rujukan standar biaya baik pada PMK maupun PMA.
4. BPKH mendukung DJPHU dalam penyusunan Standar Biaya BPIH ini, agar kemudian standar biaya tersebut dapat menjadi rujukan bersama.
5. Komponen BPIH perlu dikonfirmasi dan dilakukan pendalaman, antara lain asumsi-asumsi yang digunakan serta berbagai variabel yang memengaruhi komponen biaya itu sendiri secara komprehensif, sehingga dapat dilakukan prediksi / perhitungan BPIH untuk beberapa tahun ke depan dan pada gilirannya dapat membantu dalam perencanaan keuangan haji.
6. Pendalaman komponen BPIH dalam Negeri perlu ditelusuri antara lain dengan mengetahui aktivitas yang dilakukan di wilayah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) secara umum.
7. Formulasi perhitungan BPIH yang saat ini sedang dikaji diharapkan dapat memberikan view yang lebih komprehensif, tidak sekedar angka-angka historis, melainkan lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana biaya itu

muncul, sehingga perlu dilakukan kunjungan langsung ke penyedia untuk mendapatkan data.

8. Formulasi perhitungan juga akan disusun dengan memperhitungkan variasi harga karena perbedaan wilayah, variabel makro ekonomi dan fluktuasi harga-harga, dengan metode statistik yang pada menghasilkan satu standar biaya yang representative dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data dan fakta. Termasuk memprediksikan biaya dengan faktor uncertainty yang fluktuatif seperti biaya asuransi jiwa yang dapat diperhitungkan dengan metode statistik apabila tersedia data.
9. Penyusunan Perhitungan Standar BPIH ini merupakan langkah awal, sangat dimungkinkan standar yang dihasilkan belum ideal, dengan adanya time constrain diharapkan penyempurnaan akan dilakukan pada kesempatan berikutnya.
10. *Core business* PHU di wilayah antara lain meliputi:
 - a. Aktivitas *colleting data* jemaah sampai dengan level KUA (Kecamatan) dan *update data*, khususnya terkait jemaah berhak lunas. Hal ini dikarenakan jemaah berhak lunas telah mendaftar sejak lama, sehingga sangat mungkin jemaah tersebut telah pindah alamat, berganti nomor kontak, dan/atau terjadi perubahan data sehingga diperlukan perpanjangan tangan melalui KUA untuk mengetahui data terkini calon jemaah. Sebagai tambahan bahwa kegiatan *update data* jemaah untuk PIH 2025 sudah dimulai sejak bulan Agustus 2024 dengan informasi awal calon jemaah berangkat yang diperoleh wilayah dari PHU yang data tersebut masih dapat bergerak. Aktivitas tersebut belum terdaftar dalam BPIH, karena adanya lag waktu transfer BPIH yang menunggu persetujuan DPR dengan aktivitas tersebut.
 - b. Layanan perhajian, seperti pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi yang aktitasnya dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
 - c. Pada saat musim haji kegiatan PHU wilayah yaitu mulai dari persiapan dokumen jemaah (berupa paspor, dll), rekam *biometric*, dan layanan-layanan menjelang jemaah berangkat di embarkasi (mulai penerimaan jemaah di embarkasi hingga keberangkatan)
11. Embarkasi Makassar (Kode : UPG) saat ini melayani calon jemaah dari 8 Provinsi yang pada keberangkatan tahun 2024 juga melayani persiapan paspor sebagian jema'ah. Layanan ini diterima sebagian jemaah, namun sebagian jemaah lainnya memilih untuk mengurus paspor secara mandiri ke Imigrasi.
12. Kepala bidang PHU Kanwil Kemenag Makassar memberikan masukan agar aktivitas terkait PIH dimajukan sehingga persiapan dapat dilakukan lebih baik, misalnya pemberian data calon jemaah berangkat dari pusat dilakukan lebih awal sehingga pembentukan wilayah dapat segera membentuk kelompok terbang (Kloter).
13. Berdasarkan informasi dari Kanwil Kemenag, bahwa untuk konsumsi pada saat jemaah datang ke embarkasi, pagu biayanya masih belum mencukupi biaya standar untuk memenuhi kriteria / spesifikasi teknis yang ada dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Belum lagi biaya lain seperti pajak dan biaya lainnya.

14. Konsumsi di UPG disediakan 2 kali untuk jemaah dari luar provinsi yaitu sebelum jemaah “diterima” secara resmi oleh embarkasi dan setelah jemaah diterima.
15. Sebagian biaya kegiatan di embarkasi seperti akomodasi (porter) dan transportasi (keberangkatan dari kabupaten / kota ke embarkasi) ada yang dibiayai dari UPT.
16. Biaya manasik (setelah pelunasan, bukan manasik sepanjang tahun) sebelumnya dianggarkan sebesar Rp100,- ribu dihitung per jemaah untuk biaya ATK, dokumentasi dan publikasi, konsumsi (snack dan makan), honor nara sumber, sewa gedung dan kebersihan, serta uang transport untuk panitia.
17. Kabupaten Goa sebagai contoh, dengan jumlah jemaah lebih dari 600 orang, biaya manasik sebesar Rp100,- ribu per jemaah sepertinya masih perlu ditingkatkan lagi.
18. Aktivitas manasik ada yang dilakukan sepanjang tahun (dilakukan di Kanwil / KUA), ada juga pada saat menjelang jemaah berangkat (embarkasi). Untuk manasik menjelang jemaah berangkat, karena transfer BPIH dari BPKH ke Kemenag dilakukan setelah BPIH disetujui DPR, maka aktivitas tersebut menjadi sedikit waktunya. Oleh karena itu ada ide untuk diberikan uang muka sebelum penetapan BPIH jika dimungkinkan, dalam rangka agar aktivitas manasik menjelang keberangkatan dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum berangkat bagi jemaah yang akan berangkat. Jika perlu dilakukan penyesuaian peraturan terkait transfer BPIH. Ada masukan untuk transfer BPIH untuk biaya komponen BPIH di dalam negeri dapat dilakukan pada sekurangnya 4 bulan sebelum keberangkatan, yang mana hal ini pernah dilakukan sebelumnya (tahun 2015).
19. Terkait dengan narsum (nara sumber) pada saat manasik, oleh karena adanya perubahan kondisi dan kebijakan baik di dalam negeri maupun di KSA, sehingga petugas dapat menggunakan narsum dari Kanwil. Namun demikian, karena petugas Kanwil / KUA secara PMK tidak mendapatkan honorarium apabila menjadi narsum, maka diusulkan/menjadi rekomendasi agar ada klausa khusus.
20. Atas biaya-biaya manasik perlu didalami secara ketentuan mana yang termasuk dalam kompoen BPIH dan yang ditanggung diluar BPIH (APBN atau sumber lain).
21. Beberapa komponen biaya BPIH di dalam negeri memiliki variasi yang tinggi secara historis antara lain konsumsi dan akomodasi yang berdampak pada layanan.
22. Adanya *One Stop Service* (OSS) merupakan peningkatan layanan yang cukup membantu jemaah sehingga ketika tiba di embarkasi, antara lain jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya sejak diterima di embarkasi.
23. KUA secara struktur pada Kementerian Agama berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, membantu DJPHU dalam hal perhajian, diantara nya pada KUA telah terdapat Balai Nikah dan Manasik Haji.
24. Standar biaya ada bersama dengan standar layanan, penyusunan standar BPIH sepatutnya hadir pula bersama dengan standar layanan.
25. Asrama haji / embarkasi ada yang dimiliki oleh Kemenag, ada pula yang dimiliki Pemda yaitu Batam, Solo, dan Palembang. Perbedaan kepemilikan

itu berpengaruh pada tarif atas asrama tersebut. Karena ada perbedaan fasilitas antara asrama haji / embarkasi yang di bawah naungan Kemenag dan di bawah naungan Pemda.

26. Konsultan meminta agar dapat disampaikan data-data dan informasi terkait komponen BPIH pada wilayah Jawa, Makassar, dan wilayah lainnya yang relatif stabil dan dapat mewakili semua embarkasi secara umum. Untuk biaya komponen konsumsi di dalam negeri agar dapat diberikan data breakdown sebagaimana biaya komponen konsumsi di Arab Saudi.
27. Untuk belanja BPIH untuk pembelian aset, terdapat kendala ketentuan dan telah menjadi temuan pemeriksa. Padahal hal tersebut diperlukan untuk perhajian, sehingga perlu disepakati aturan bersama, termasuk dengan pemeriksa, sehingga hal ini tidak lagi menjadi permasalahan di kemudian hari.
28. Pada akhirnya disepakati bahwa Kemenag baik dari PHU maupun Kanwil akan memberikan *supply data*, kemudian melanjutkan acara dengan survei lapang di embarkasi, KUA, dan penyedia layanan *catering*.



Gambar 4. 12 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar



Gambar 4. 12 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Makassar (Lanjutan)

4.8 Kunjungan ke Embarkasi Makassar

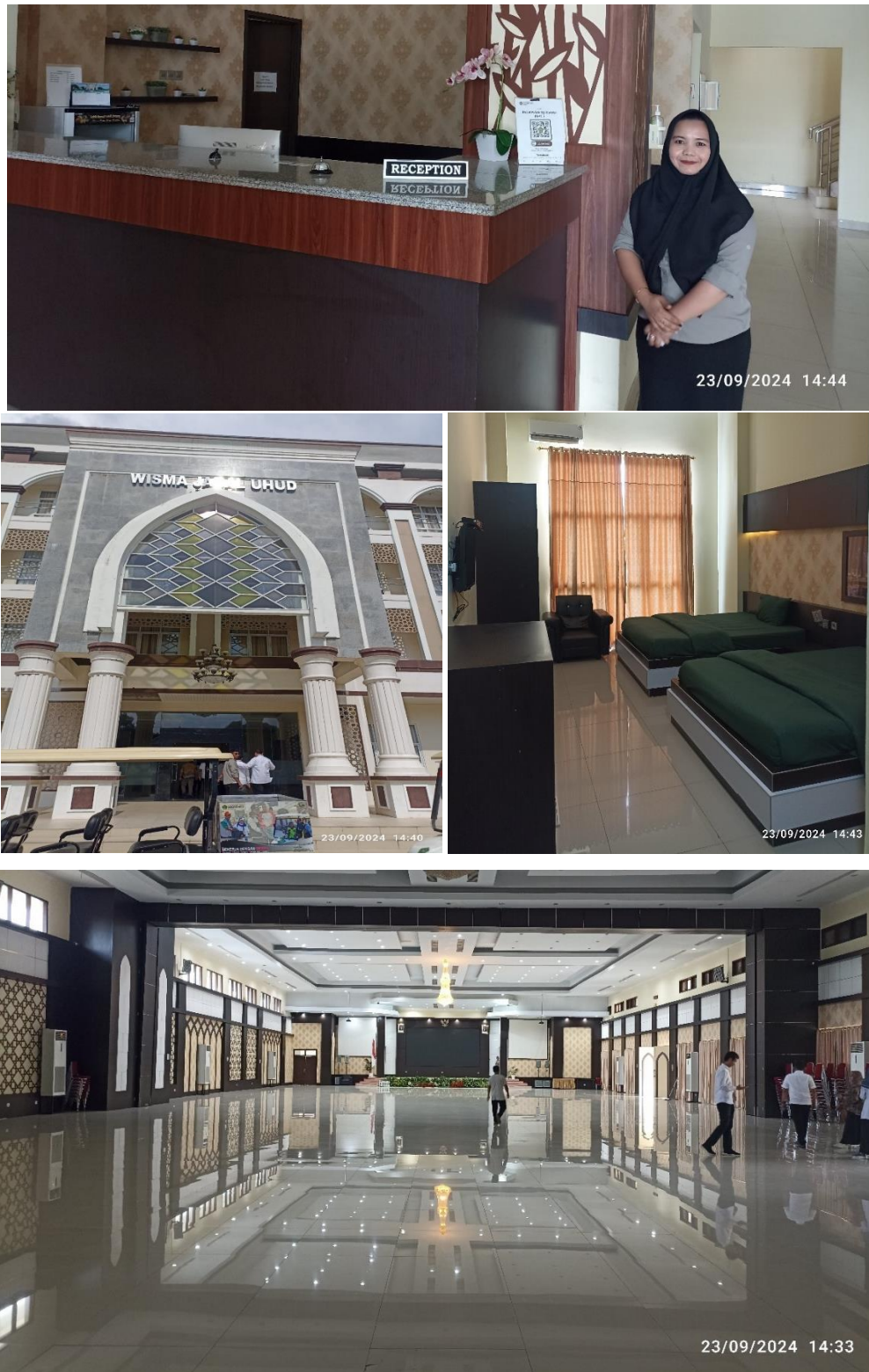
Kunjungan ke Embarkasi Makassar dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, bersama dengan Bapak Zulkifly Hijaz selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Makassar bersama jajaran. Beberapa poin pembahasan antara lain:

1. Aktivitas belanja modal tidak diperbolehkan menggunakan dana BPIH, padahal terdapat kebutuhan untuk itu, misalnya untuk pembelian pagar pembatas, fasilitas embarkasi, dsb, sehingga kondisi asrama masih perlu diperhatikan lebih.
2. Konsultan meminta agar dapat disediakan data komponen biaya berdasarkan kontrak untuk aktivitas-aktivitas PIH di embarkasi mulai jemaah tiba, diterima, dan berangkat.
3. Kegiatan selanjutnya kemudian berupa peninjauan langsung ke lokasi aktivitas PIH di embarkasi, mulai dari penerimaan jemaah di Aula Arafah, penginapan jemaah antara lain di Wisma Jabal Uhud, hingga wisma tempat jemaah akan dilepas untuk berangkat ke bandara.

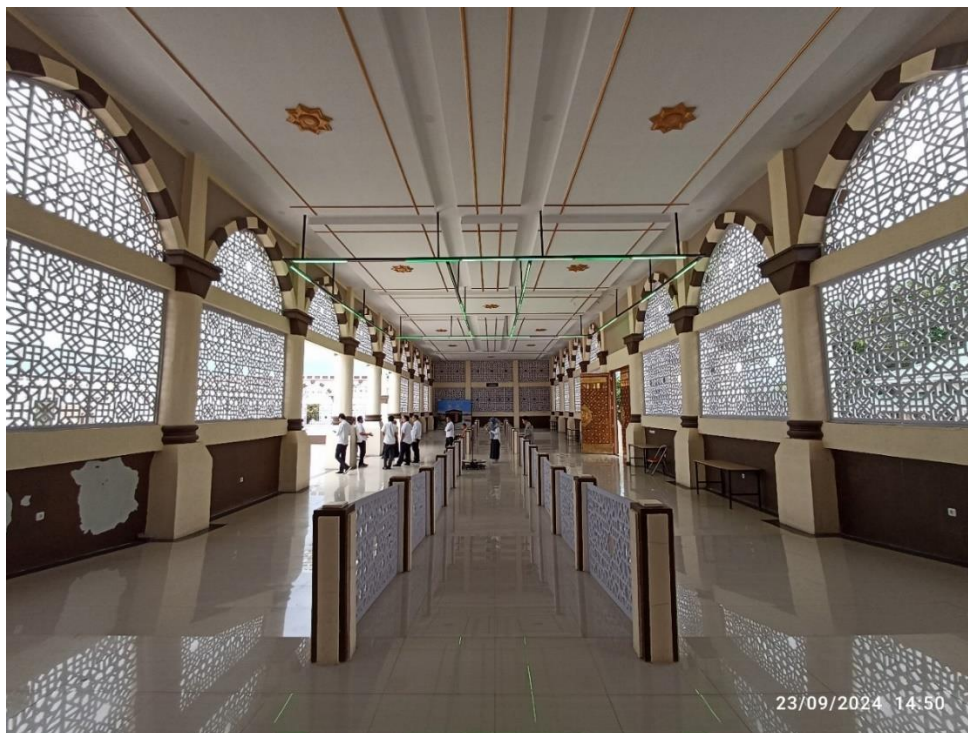
4. Selain itu, dilakukan juga peninjauan ke dapur, tempat manasik, dan *mock up* pesawat yang biaya pembangunannya ±Rp2 miliar.



Gambar 4. 13 Lokasi Penerimaan Jemaah di Aula Arafah Makassar



Gambar 4. 14 Tempat Penginapan Jemaah di Wisma Jabal Uhud Makassar



Gambar 4. 15 Lokasi Manasik Haji di Makassar



Gambar 4. 16 Kondisi Dapur di Embarkasi Makassar



Gambar 4. 17 Mockup Pesawat Jemaah Haji

4.9 Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya

Rapat koordinasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biring Kanaya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, bersama dengan kepala KUA Bapak Abdul Rahman berserta jajarannya. KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kemenag yang bertanggung jawab pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).



Gambar 4. 18 Kunjungan ke KUA Kecamatan Biring Karaya, Kota Makassar

Poin-poin pembahasan diantaranya:

1. Aktivitas KUA yang berkaitan dengan PIH diantaranya manasik sepanjang tahun dengan skala calon jemaah sekurangnya 45 orang, atau biasa disebut juga sebagai manasik kelompok (untuk manasik pada embarkasi disebut juga sebagai manasik masal).
2. Untuk kecamatan yang calon jemaahnya kurang dari 45 orang dapat mengikuti manasik kelompok dengan bergabung dengan kecamatan lain.
3. Untuk biaya-biaya yang muncul dari aktivitas manasik antara lain biaya konsumsi dan biaya narsum, atau paket halfday jika diadakan di hotel.

4. Fungsi KUA terkait perhajian antara lain sebagai perpanjangan Kemenag untuk melakukan verifikasi data, terutama data jemaah yang berhak lunas dan akan berangkat haji (seperti data alamat dan kontak).
5. Materi manasik sepanjang tahun antara lain cara pembayaran pelunasan, dan manasik sepanjang tahun diberikan untuk jemaah tunggu.
6. Bimbingan manasik menjadi salah satu kinerja bagi KUA.
7. Dengan pembebanan biaya manasik per jemaah, maka terdapat potensi biaya tidak tercover untuk wilayah yang jemaahnya sedikit.
8. Manasik untuk jemaah yang akan berangkat diharapkan dapat dilakukan sebelum bulan Ramadhan.

4.10 Rapat Koordinasi di Kementerian Agama Kota Makassar

Rapat koordinasi di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk kuota Kota Makassar 1200, tersebar di 14 kecamatan, namun alokasi kecamatan tidak rata untuk jemaah haji. Ada 10 titik manasik haji di Kecamatan antara lain 8 kali Kecamatan, di gedung pertemuan 1 kali di masjid Kubah-99 dan 1 kali di tingkat kota. Kami menyalurkan anggaran sesuai dengan tusinya, sesuai dengan petunjuk dari kantor wilayah. Kami dapat anggaran dari kanwil, kami serahkan ke Kecamatan. Acara manasik kota, dimulai dari pengarahan Kepala Kanwil, setelah itu materi dari narasumber. Bimbingan manasik haji yang dilakukan kantor Kemenag dan KBIH proporsinya 50 banding 50.



Gambar 4. 19 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kementerian Agama, Kota Makassar



Gambar 4. 19 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Kementerian Agama, Kota Makassar (Lanjutan)

4.11 Kunjungan Pemilik Katering Jemaah Haji Embarkasi Sulawesi Selatan

Kunjungan pemilik katering jemaah Haji Embarkasi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa anggaran Rp.180,- ribu ini dialokasikan untuk 3x makan dan 3x snack (snack selamat datang, snack antara, snack kepulangan), termasuk jika nanti ada tambahan transit. Untuk menu makanan sudah ditentukan dari Kemenag Kanwil Sulawesi Selatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Terkait dengan bahan baku makanan, pihak katering sudah ada supplier yang bekerja sama sehingga harga dan bahannya lebih pasti. Hal ini dikarenakan pesanan katering dalam jumlah besar untuk melayani seluruh jemaah haji. Ada kenaikan harga bahan baku sekitar 5-10% ketika mendekati musim haji, namun kami tetap memberikan layanan maksimal untuk tamu. Bahan baku yang naik utamanya telur, beras, ayam, daging, karena mendekati lebaran kami biasanya sudah menyusun perhitungan dan meminta supplier menyiapkan segala sesuatunya. Untuk harga cabai cenderung stabil ya, namun kami tidak menggunakan cabai dalam makanan karena sesuai petunjuk dari KKP yang tidak memperbolehkan untuk menu sambal. Terkait dengan variasi biaya makan, sebesar Rp.37.000, Rp40.000, Rp45.000, dibedakan antara makan pagi, siang dan malam.



Gambar 4. 20 Dokumentasi Kunjungan ke Pemilik Katering Jemaah Haji di Sulawesi Selatan

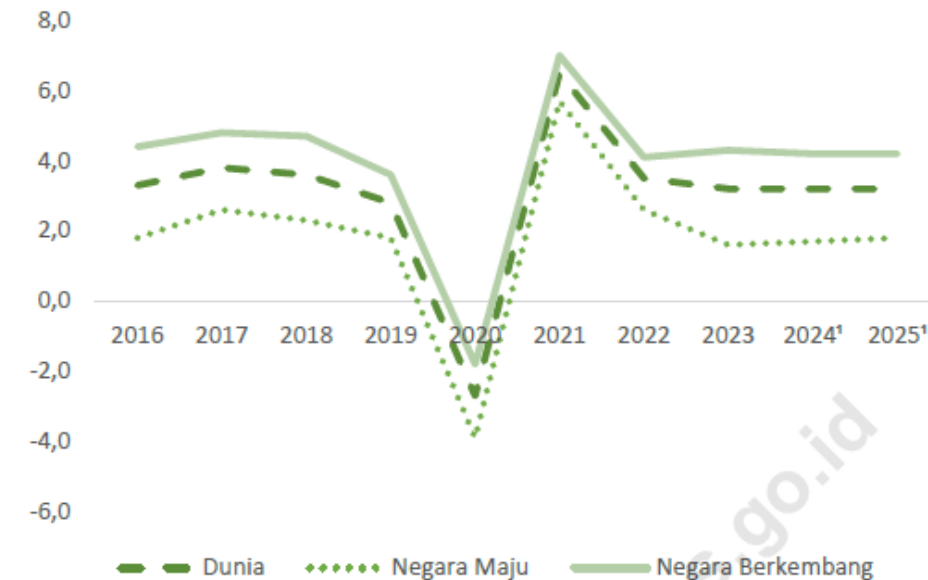
BAB V STANDAR BIAYA OPERASIONAL HAJI

5.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global dan nasional. Ekonomi global terus melambat sejak pemulihan pasca pandemi Covid-19. Inflasi yang masih tinggi dan penurunan produktivitas berkontribusi atas perlambatan ekonomi yang terjadi. Hingga semester pertama tahun 2024 ini, negara-negara dunia masih menghadapi ketidakpastian. Tensi geopolitik yang semakin naik ditambah suku bunga kebijakan negara maju yang masih tinggi menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Selain itu, fragmentasi geoekonomi dan perubahan iklim menjadi risiko perekonomian ke depan. Dengan berbagai tantangan yang ada, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan stagnan di level 3,2 persen hingga tahun 2025 nanti di tengah inflasi yang diproyeksikan melambat (IMF 2024).

Indonesia sebagai negara berkembang ikut terdampak kondisi perekonomian global. Ekonomi dan inflasi nasional pada 2023 turut melambat di tengah tekanan dunia. Pada triwulan I dan II 2024 ini, perekonomian tumbuh solid namun dengan tren yang menurun. Sehingga, secara keseluruhan ekonomi diproyeksikan stagnan di level lima persen. Kebijakan dan upaya terintegrasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berdaya saing sebagai fondasi menghadapi risiko dan tantangan di tahun ini. Harga komoditas global yang meningkat menyebabkan inflasi berada pada level tinggi sehingga diberlakukan kebijakan moneter yang ketat untuk menekan laju inflasi. Kebijakan moneter yang diambil salah satunya dengan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi sehingga membatasi jumlah uang beredar di pasaran dan dialihkan dalam bentuk simpanan. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, artinya permintaan semakin terbatas dan ekonomi global secara keseluruhan melambat (IMF 2024).

Ekonomi negara maju yang melambat pada 2023 memberi pengaruh dominan pada ekonomi global secara keseluruhan. Negara maju lebih terdampak dengan adanya pengetatan kebijakan moneter. Hal ini ditunjukkan dari capaian pertumbuhan ekonomi negara maju yang melambat pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Di tengah perlambatan ekonomi global dan negara maju, ekonomi di negara berkembang tumbuh stabil pada 2023. Pertumbuhan ditopang pembentukan modal tetap dan tenaga kerja yang tumbuh lebih tinggi (IMF 2024). Perlambatan ekonomi yang terjadi secara global mencerminkan hambatan-hambatan ekonomi akibat produktivitas yang tidak merata antar sektor sehingga perlu realokasi modal dan tenaga kerja. Kebijakan yang tepat perlu diarahkan untuk mendorong pasar perdagangan yang terbuka akses keuangan, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Hal ini untuk mengatasi hambatan kelembagaan dan keuangan sehingga meningkatkan produktivitas (IMF 2024).



Catatan: ¹Angka proyeksi

Sumber: *International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2024*

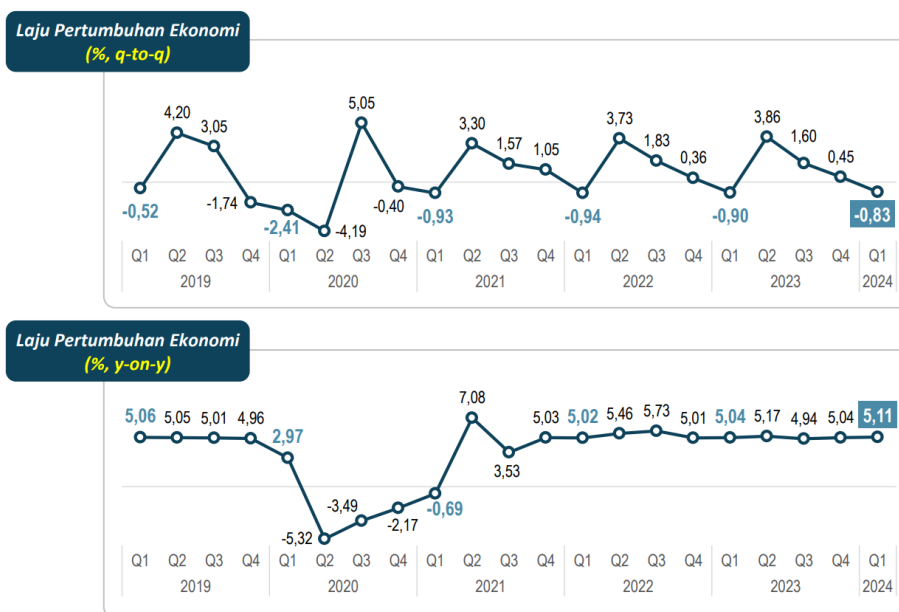
Gambar 5. 1 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Global (persen), 2016–2025

Perekonomian global terus menunjukkan pemulihan dengan tetap tumbuh positif meskipun melambat. Inflasi juga sudah berada dalam level moderat. Aktivitas manufaktur dunia yang tercermin dari Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur global berada dalam level ekspansif sejak awal 2024. Namun, beragam risiko dan ketidakpastian masih perlu diwaspadai. Sepanjang awal 2024, gejolak perekonomian global tampak meningkat. Eskalasi ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasok komoditas. Fragmentasi ekonomi menyebabkan negara produsen cenderung melakukan proteksi dan membatasi ekspor sehingga arus perdagangan internasional terhambat. Pembatasan ekonomi yang terjadi berpotensi meningkatkan harga komoditas global yang memicu inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan suku bunga ditahan pada level yang masih tinggi. Di samping itu, ketahanan pangan terancam seiring perubahan iklim akibat El Nino. Dengan risiko dan ketidakpastian ini, IMF memproyeksikan perekonomian global stagnan di level 3,2 persen hingga 2025 mendatang (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Ekonomi global diproyeksikan tumbuh stagnan seiring inflasi yang semakin melandai. Inflasi melambat karena harga energi dan barang yang melandai. Ekonomi negara maju diproyeksikan menguat dengan didukung perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang semakin pulih dan tangguh. Sementara negara berkembang diperkirakan sedikit melambat akibat ekonomi tumbuh moderat di Tiongkok, India, dan negara-negara berkembang Eropa. Krisis properti yang terjadi di Tiongkok berimbas pada perekonomian domestik dan keuangan global. Hal ini karena sepertiga ekonomi Tiongkok diperoleh dari sektor properti. Sebagai salah satu pasar ekspor impor internasional, pembatasan ekspor yang diberlakukan Tiongkok dapat mendorong inflasi barang (IMF 2024).

5.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I dan II Tahun 2024

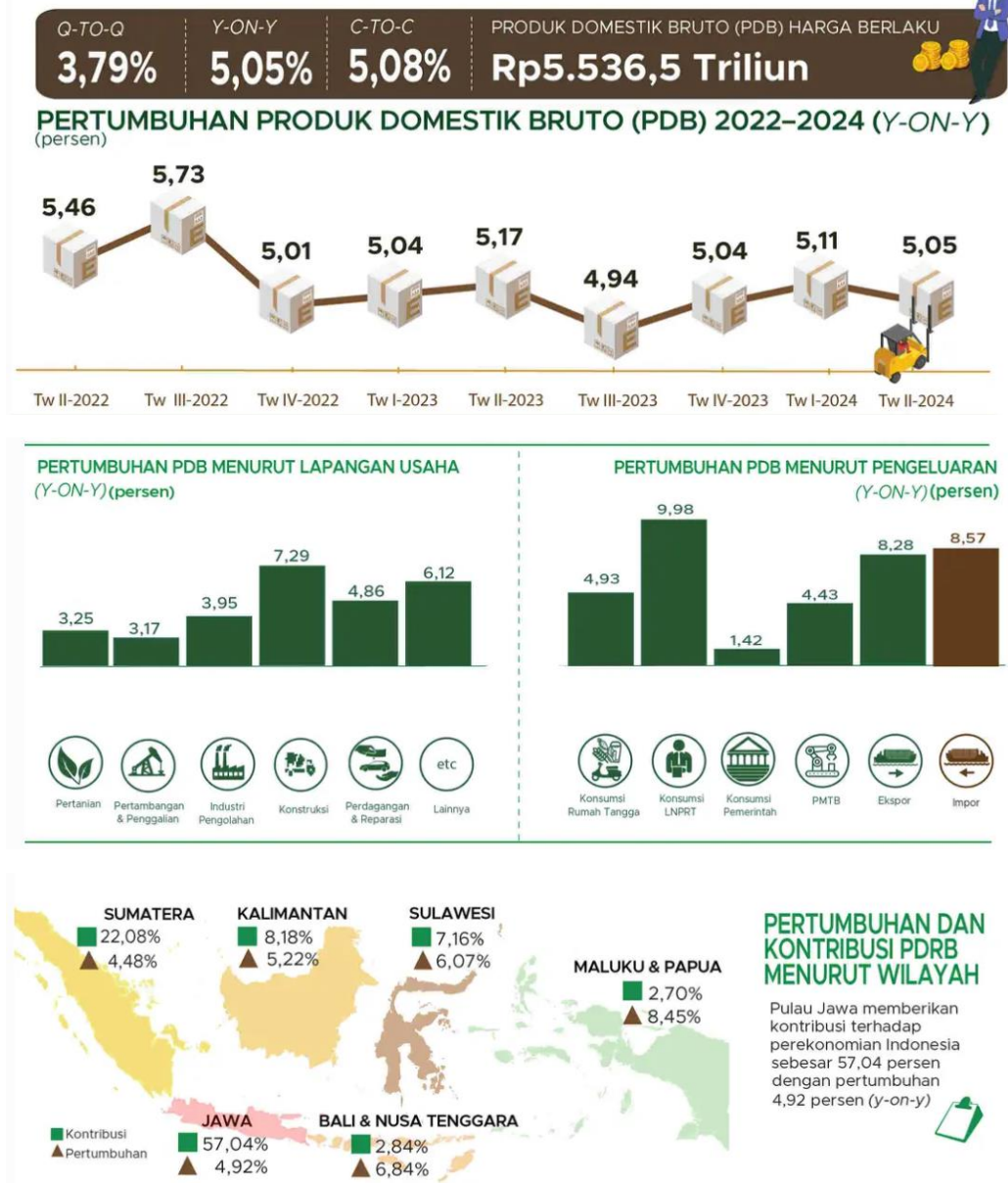
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen. Selama triwulan I-2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibanding triwulan I-2023 (y-on-y). Dibandingkan Triwulan 4-2023, ekonomi Indonesia pada Triwulan 1-2024 terkontraksi sebesar 0,83% (q-to-q), mengikuti pola musiman tahun-tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,11% pada Triwulan 1-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.



Sumber: BPS

Gambar 5. 2 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I dan II Tahun 2024

Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XXVII, 5 Agustus 2024



Sumber : BPS

Gambar 5. 3 Gambar Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2022-2024

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.231,0 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,43 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,58 persen. Ekonomi

Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,05 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,98 persen. Ekonomi Indonesia semester I-2024 terhadap semester I-2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,25 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,84 persen. Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2024 menunjukkan pertumbuhan positif pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan peranan sebesar 57,04 persen dari ekonomi nasional dan mencatat kinerja pertumbuhan sebesar 4,92 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2023.

5.3 Peluang dan Tantangan Kedepan Di Tengah Risiko Ketidakpastian

Dinamika perekonomian global perlu dihadapi dengan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan, serta suportif dalam mendukung program pembangunan. Pada triwulan I dan II 2024, ekonomi nasional masih mampu tumbuh solid di level lima persen. Permintaan domestik yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 (yoy) tumbuh hingga dua digit. Konsumsi LNPRT melonjak didorong peningkatan aktivitas terkait pemilu. Belanja pemerintah mengalami kenaikan akibat belanja pegawai dengan adanya kenaikan gaji ASN dan pemberian THR, serta belanja terkait pemilu. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan utamanya ditopang pertambangan dan akomodasi. Sektor pertambangan tumbuh seiring produksi dan ekspor bijih logam terutama tembaga yang meningkat. Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum tumbuh seiring kenaikan jumlah wisatawan. Secara regional, ekonomi nasional mampu tumbuh dengan baik berkat dorongan pertumbuhan positif dari seluruh provinsi.

Sektor keuangan domestik masih dalam bayang-bayang gejolak pasar keuangan global. Pasar saham mengalami tekanan, tercermin dari IHSG yang melemah hingga triwulan II 2024. Hal ini sebagai dampak ketidakpastian ekonomi dan arah kebijakan moneter negara maju. Pemerintah juga menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang melemah. PMI Manufaktur Indonesia berhasil mempertahankan capaiannya dengan berada di level ekspansif selama 34 bulan berturut-turut hingga Juni 2024. Ini menandakan kepercayaan investor yang masih tangguh terhadap sektor industri pengolahan di Indonesia. Industri pengolahan merupakan kontributor utama perekonomian nasional, sehingga pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor ini khususnya untuk komoditas berbasis ekspor (Badan Kebijakan Fiskal 2024).

Investasi mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I dan II 2024, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia masih cukup tinggi. Hilirisasi yang semakin meningkat dan stabilitas yang terjaga menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Neraca perdagangan luar negeri masih mencatatkan surplus. Tren surplus hingga Juni 2024 sudah bertahan selama 50 bulan berturut-turut. Namun menjelang akhir triwulan II 2024, trennya mulai melambat. Pariwisata tumbuh kuat seiring mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan naik signifikan, disertai kenaikan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, juga transportasi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran lima persen pada 2024. Bank Indonesia dan IMF memproyeksikan ada sedikit peningkatan pertumbuhan pada 2025, sementara proyeksi ADB tetap stagnan. Konsumsi swasta, pembangunan infrastruktur, dan investasi yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan tetap konsisten.

Tabel 5. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia (Persen), 2024 - 2025

Indikator		2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	BI	4,75 – 5,5	4,8 – 5,6
	IMF	5,0	5,1
	ADB	5,0	5,0
Inflasi	IMF	2,6	2,6
	ADB	2,8	2,8

Sumber : Bank Indonesia, Laporan perekonomian Indonesia 2023 International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2024 Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2024

Dalam periode 2025-2027, pemerintah melalui PMK No. 31 tahun 2024 menetapkan sasaran inflasi berada dalam rentang 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Inflasi dijaga agar tetap stabil dan rendah dalam Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Laju inflasi masih terkendali, namun berbagai langkah dan upaya perlu dilakukan sebagai mitigasi risiko gejolak harga ke depan seperti menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan distribusi berjalan lancar. Peran APBN sebagai instrument kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian dari berbagai gejolak sosial ekonomi di tingkat nasional maupun global juga perlu dioptimalkan.

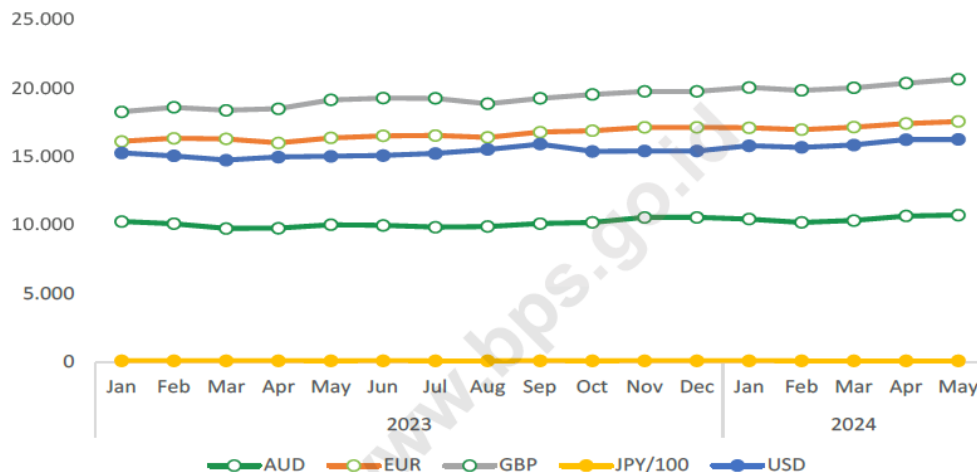
Indonesia bersiap menghadapi tantangan eksternal dan internal yang akan menekan perekonomian tahun ini. Beberapa diantaranya yaitu penyelenggaraan pemilu 2024 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan politik sehingga memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat, harga pangan dan energi global yang naik memicu inflasi meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat, defisit anggaran pemerintah, dan

pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain dengan bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin, menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah tetap stabil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yaitu revitalisasi mesin konvensional, pelatihan vokasi, pembangunan infrastruktur, Proyek Strategis Nasional (PSN), *Mass Rapid Transit* (MRT), kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penguatan ketahanan pangan (Kemenko Perekonomian 2024).

Pasokan tenaga kerja sebagai subyek pembangunan perlu dimaksimalkan. Sayangnya, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dari tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ekonomi. Pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh anak, seperti melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, perlu penyesuaian keterampilan dan pendidikan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja agar nantinya mereka yang terjun dalam angkatan kerja mampu terserap. Kedua, meningkatkan akses kesehatan sehingga tercapai kesejahteraan fisik. Fisik yang sehat dan kuat dibutuhkan tenaga kerja untuk mencapai output yang maksimal. Keberadaan akses dan jaminan kesehatan penting sebagai upaya perlindungan pekerja selama menjalankan pekerjaannya. Ketiga, program perlindungan sosial yang tepat guna dan sasaran bagi seluruh Masyarakat miskin. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala (ADB 2024).

5.4 Nilai Tukar Rupiah Berfluktuasi

Perkembangan kurs rupiah terhadap beberapa mata uang dunia mengalami fluktuasi selama tahun 2023. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Rupiah menunjukkan volatilitas yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Rupiah cenderung melemah di awal tahun 2023 sebagai akibat dari kekhawatiran pasar atas kondisi ekonomi global dan efek ketatnya kebijakan moneter dari The Fed. Tetapi, rupiah mulai menunjukkan tandatanda penguatan saat memasuki akhir tahun 2023 seiring dengan penguatan ekonomi, stabilisasi harga komoditas dan pemulihan ekonomi domestik. Hal ini sayangnnya tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 2024, kondisi ekonomi global kembali menekan rupiah sebagai imbas dari ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan moneter AS yang lebih agresif.



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Mei 2024

Gambar 5. 4 Perkembangan Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia, Januari 2023 – Mei 2024

Selain terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah juga mengalami fluktuasi terhadap dolar Australia sebagai dampak dari dinamika ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. Dinamika ekonomi yang tercakup seperti menguatnya ekspor komoditas dari Australia serta perubahan kebijakan suku bunga yang ditetapkan bank sentral Australia turut mempengaruhi pergerakan rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia cenderung stabil dengan sedikit tekanan pada kuartal ketiga selama tahun 2023 sebagai imbas dari kenaikan harga komoditas dari Australia. Sementara itu, posisi nilai tukar rupiah terhadap euro, poundsterling dan yen Jepang menunjukkan tren yang beragam. Selama tahun 2023, rupiah relatif stabil terhadap euro meski krisis energi di Eropa menyebabkan beberapa tekanan di pertengahan tahun. Sedangkan terhadap poundsterling, sepanjang tahun 2023 rupiah mengalami pelemahan. Berbeda halnya dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap euro dan poundsterling, volatilitas yang besar terjadi pada posisi nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan moneter Jepang yang tidak konvensional dan fluktuasi pasar global yang mempengaruhi aliran modal.

Hasil proyeksi nilai tukar Rupiah Terhadap Dollar (USD) dengan menggunakan metode ARIMA dan Random Forest sebagai berikut:



Gambar 5. 5 Hasil *Forecasting* Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar (USD)

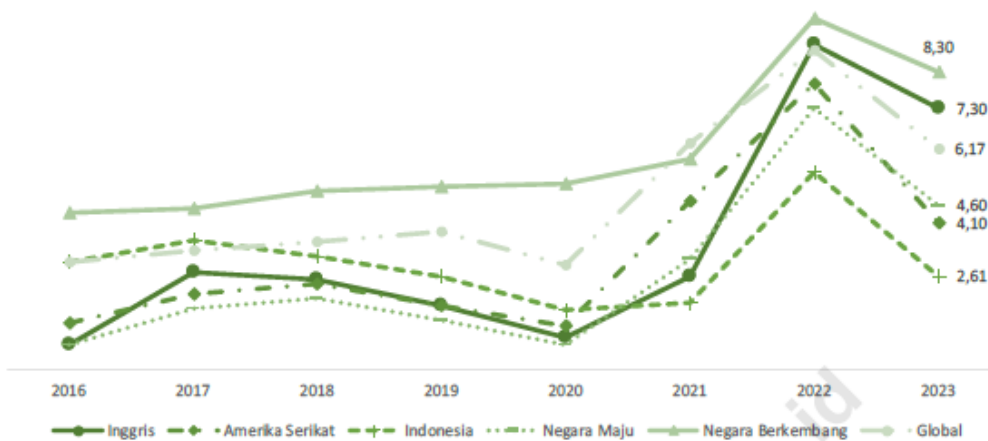
Pendekatan untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolla (USD) dengan dua metode yaitu ARIMA dan Random Forest. Hasil yang menunjukkan nilai tukar rupiah berada di posisi 1500-an sampai periode 2030. Hal ini menunjukkan tingkat kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar di kisaran 1500 – 1600. Namun perlu disiapkan risiko peningkatan tren naik untuk kurs rupiah dengan metode ARIMA dengan kondisi nilai tukar rupiah semakin melemah di angka 1700-an di tahun 2030.

Tabel 5. 2 Proyeksi Kurs USD dan SAR Tahun 2025-2030

Tahun	USD		SAR	
	Random Forest	ARIMA	Random Forest	ARIMA
2025	15,649	16,921	4,178	4,515
2026	15,027	17,185	4,034	4,582
2027	15,026	17,617	4,033	4,689
2028	14,994	18,522	4,023	4,933
2029	15,028	19,007	4,026	5,075
2030	15,153	17,768	4,061	4,736

5.5 Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Selain pesatnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan terjaganya tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target menjadi prioritas utama pembangunan perekonomian nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020). Inflasi dijaga tidak terlampau tinggi karena dapat menggerus daya beli masyarakat, terlebih masyarakat miskin (Murjani 2019). Murjani (2019) menemukan bahwa setiap kenaikan inflasi tahunan sebesar satu persen dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,95 persen. Pun begitu, inflasi juga dijaga untuk tidak terlalu rendah karena bisa menjadi sinyal negatif bagi turunnya produktivitas ekonomi dan menyebabkan modal asing mengalir keluar dari Indonesia (Manurung dan Yuniasih 2022).



Catatan: Inflasi Indonesia 2015-2019 menggunakan IHK 82 kota (2012=100) dan inflasi 2020–2022 menggunakan IHK 90 kota (2018=100)

Sumber: *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database*, April 2024.

Gambar 5. 6 Perbandingan Inflasi Beberapa Negara *Year-on-Year* (persen), 2016–2023

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, inflasi pada tahun 2024 dijaga pada ambang 2,5 persen dengan deviasi sebesar satu persen (Kementerian Keuangan RI 2021). Pengendalian inflasi melibatkan banyak stakeholder karena tidak hanya memerlukan instrumen kebijakan moneter yang diampu Bank Indonesia, tetapi juga melalui jaminan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi oleh pemerintah. Inflasi dihitung melalui perubahan pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Tahun dasar yang digunakan pada penghitungan IHK dimutakhirkan secara berkala. Pada tahun 2020, penghitungan IHK menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar dengan mencakup 90 kota inflasi pada 11 kelompok komoditas berdasarkan COICOP 2018. Empat tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 2024, IHK dihitung dengan tahun dasar 2022 dan melingkupi 150 kabupaten/kota. Perbedaan

utama antara IHK tahun dasar 2018 dan 2022 terletak pada kerangka acuan yang digunakan, pembaruan keranjang konsumsi, peningkatan metodologi, dan respons terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemutakhiran ini bertujuan agar menjaga relevansi dan akurasi metodologi penghitungan IHK demi memotret kondisi stabilitas harga sesungguhnya di Indonesia dengan mempertimbangkan pola konsumsi dan dinamika ekonomi terkini.

Tabel 5. 3 Proyeksi Inflasi Negara Arab Saudi (KSA) dan Indonesia (INA)

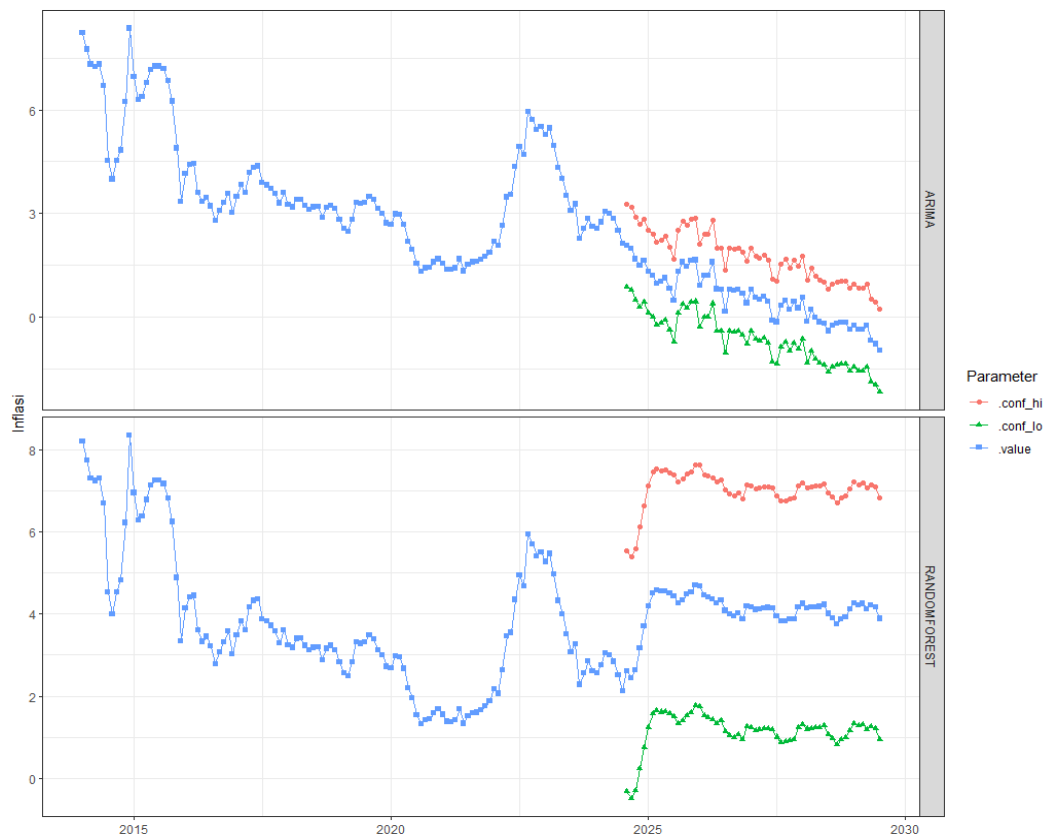
Tahun	Inflasi-INA	Inflasi-KSA
2025	4.4756	2.3606
2026	4.2224	2.6561
2027	4.0314	2.6613
2028	4.0624	2.6613
2029	4.1614	2.6613
2030	4.0866	2.6613

Inflasi menurut karakteristik perubahan harganya dapat dibedakan menjadi inflasi inti (*core inflation*) dan inflasi non-inti (*non-core inflation*). Inflasi inti mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak dipengaruhi oleh faktor musiman atau harga yang diatur pemerintah, dan biasanya memberikan gambaran tentang tekanan inflasi yang lebih mendalam dalam perekonomian. Sementara itu, inflasi non inti cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat tentatif dan cenderung lebih bergejolak (*volatile*). Inflasi non inti tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered*) dan inflasi barang bergejolak (*volatile*). Adapun contoh inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered*) seperti harga BBM bersubsidi, tarif dasar listrik dan lainnya. Sementara contoh inflasi barang bergejolak (*volatile*) adalah seperti harga beras, cabai dan komoditas yang umumnya dipengaruhi oleh faktor musim, rantai pasok dalam distribusi dan bencana alam.

Sepanjang tahun 2023, inflasi umum di Indonesia mengalami fluktuasi namun secara tahunan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 2,61 persen. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor musiman, kebijakan, dan kondisi eksternal. Dilihat berdasarkan data bulanan tahun 2023, inflasi pada bulan Januari sebesar 0,34 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 0,16 persen pada bulan Februari. Penurunan ini disebabkan oleh stabilisasi harga pangan setelah periode tahun baru musim liburan. Kemudian pada bulan Maret 2023 inflasi kembali naik tipis menjadi 0,18 persen, hal ini berkaitan dengan dimulainya bulan Ramadan dimana permintaan barang konsumsi mulai meningkat. Masih dalam nuansa Ramadan-Idul Fitri pada bulan April 2023, inflasi kembali naik menjadi 0,33 persen, namun perlahan inflasi mulai relatif stabil di bulan Juni 2023 dimana terjadi penurunan harga bahan bakar pada bulan ini. Bulan Juli 2023 memasuki tahun ajaran baru sehingga menyebabkan kenaikan harga pada sektor pendidikan sehingga menyebabkan inflasi dibulan Juli naik menjadi 0,21 persen. Bulan Agustus-September 2023

inflasi terkendali di 0,17 persen dan 0,14 persen. Musim panen di beberapa daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menuju akhir tahun, inflasi mengalami kenaikan, mencapai 0,41 persen di bulan Desember. Lonjakan harga bahan pangan menjelang liburan akhir tahun dan dampak *el-Nino* mendorong kenaikan inflasi di akhir tahun.

Harga pangan pada tahun 2023 menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada tahun 2023 sebesar 6,18 persen dan memiliki andil besar dalam pembentukan inflasi tahun 2023. Gangguan cuaca, seperti curah hujan yang tidak teratur dan bencana alam, mempengaruhi produksi pertanian, sehingga memicu kenaikan harga pada komoditas seperti beras, sayuran, dan daging. Selain itu, gangguan pada rantai pasokan global dan peningkatan biaya logistik turut menambah tekanan harga pada bahan pangan. Inflasi pada tahun 2023 secara tahunan cenderung lebih moderat dan terkendali dibandingkan dengan 2022. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi global yang lebih stabil dan kebijakan ekonomi domestik yang lebih efektif. Langkah-langkah kebijakan yang lebih proaktif dari pemerintah berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pada pengeluaran konsumen.



Gambar 5. 7 Hasil Prediksi Inflasi Indonesia



Gambar 5. 8 Hasil Prediksi Inflasi Arab Saudi

5.6 Hasil Pengumpulan Data Kementerian Agama Dalam Penyusunan Standar Biaya Operasional Haji

Hasil rincian komponen BPIH menjadi acuan standar penyusunan biaya, urutan dari yang paling besar kontribusinya terhadap BPIH sampai yang paling kecil. Beberapa rincian perlu dilakukan evaluasi karena terdapat pengulangan perhitungan misalnya adalah Asuransi, dan pengelolaan BPIH baik di Arab Saudi dan Indonesia serta kalimat perlindungan yang beririsan dengan asuransi.

No Rincian Komponen BPIH	Kontribusi	
1 Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP)	34.017%	Ada unsur Perlindungan/ Asuransi
2 Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina	18.067%	
3 Akomodasi Makkah	17.907%	
4 Konsumsi Arab Saudi	6.736%	
5 Akomodasi Madinah	5.609%	
6 Akomodasi Arab Saudi	5.446%	
7 Transportasi Arab Saudi	4.875%	
8 Living Cost	3.175%	
9 Visa	1.270%	
10 Pembinaan Jemaah Haji di Tanah Air	0.958%	
11 Pelayanan Umum di Dalam Negeri	0.667%	
12 Pengelolaan BPIH	0.222%	Pengelolaan BPIH
13 Konsumsi di Embarkasi	0.197%	
14 Premi Asuransi dan Perlindungan Lainnya	0.178%	Ada unsur Perlindungan/ Asuransi (Jiwa dan Kecelakaan)
15 Dokumen Perjalanan Dalam Negeri	0.157%	
16 Perlindungan Arab Saudi	0.142%	1. Penanganan dan perawatan Jemaah sakit pasa ops dan pemakaman 2. asuransi kesehatan
17 Akomodasi di Embarkasi	0.128%	
18 Pelayanan di Embarkasi atau Debarkasi	0.094%	
19 Pelayanan Umum di Arab Saudi	0.065%	1. Pengadaan dan Pengiriman Gelang Identitas Jemaah Haji 2. Biaya Penanganan dan Perawatan Jemaah Haji 3. Koordinasi pelindungan jemaah haji
20 Perlindungan Dalam Negeri	0.056%	
21 Pembinaan Jemaah Haji di Arab Saudi	0.018%	
22 Pelayanan Keimigrasian Dalam Negeri	0.014%	
23 Pengelolaan BPIH di Arab Saudi	0.005%	Pengelolaan BPIH

Gambar 5. 9 Rincian Penyusunan Biaya Operasional Haji – BPIH

5.7 Hasil Perhitungan Data Penetapan Besaran Asuransi Jiwa

Kontribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi syariah yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran Tabarru' dan sebagian lainnya sebagai Ujrah untuk Perusahaan. Iuran Tabarru' adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis yang kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan Dana Tabarru' sesuai Akad Tabarru'.

Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran Tabarru' seluruh pemegang polis/peserta yang terdaftar dalam suatu perusahaan asuransi syariah, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati. Dana Tabarru' merupakan dana milik pemegang polis yang digunakan untuk membayar nilai manfaat/uang santunan kepada ahli waris peserta. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana Tabarru' dan menerima biaya pengelolaan yang disebut dengan Ujrah. Besar Kontribusi yang wajar dihitung dengan formula sebagai berikut:

Kontribusi = Iuran Tabarru' + Ujrah

Iuran Tabarru' dihitung berdasarkan perkiraan besar manfaat yang akan dibayarkan berdasarkan perkiraan Jemaah Haji yang meninggal dunia, meninggal dunia karena kecelakaan dan cacat. Sedangkan *ujrah* dihitung berdasarkan kewajiban biaya pengelolaan dana tabarru' tersebut.

Berdasarkan data individual Jemaah Haji 1445H/2024M yang telah melunasi per 23 Februari 2024, diketahui:

- nilai manfaat untuk Jemaah Haji Reguler ditetapkan sebesar BIPIH tahun 1445H/2024M untuk masing-masing embarkasi
- perkiraan besar manfaat yang akan dibayarkan dihitung dengan mengalikan probabilitas meninggal dunia/meninggal dunia karena kecelakaan/cacat dan nilai manfaat
- Iuran Tabarru' dihitung sebagai penjumlahan atas perkiraan besar manfaat yang akan dibayarkan untuk seluruh kemungkinan pembayaran manfaat (meninggal dunia, meninggal dunia karena kecelakaan dan cacat)
- Ujrah dihitung dengan mengalikan asumsi ujrah dan perkiraan besar manfaat yang akan dibayarkan
- besar Kontribusi untuk seluruh Jemaah Haji ditetapkan sebagai pembagian total Iuran Tabarru' dan Ujrah untuk seluruh Jemaah Haji dibagi dengan jumlah seluruh Jemaah Haji.

Bagian berikut ini menyajikan dasar penetapan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial:

1. Asumsi Tingkat Mortalita
2. Asumsi Meninggal karena Kecelakaan
3. Asumsi Cacat
4. Asumsi Masa Asuransi
5. Asumsi ujrah

Nilai manfaat sebesar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berdasarkan embarkasi sesuai ketentuan Haji 2024 antara lain:

- Manfaat Meninggal Dunia Bukan karena Kecelakaan sebesar:
100% x Bipih
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar:
200% x Bipih
- Manfaat Cacat Tetap Total sebesar:
100% x Bipih

Tabel 5. 4 Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berdasarkan Embarkasi Sesuai Ketentuan Haji 2024

Kode Embarkasi	Embarkasi	Bipih
BTJ	Aceh	49.995.870
KNO	Medan	51.145.139
BTH	Batam	53.833.934
PDG	Padang	51.739.357
PLM	Palembang	53.943.134
JKG	Jakarta Pondok Gede	58.498.334
JKS	Jakarta Bekasi	58.498.334
SOC	Solo	58.562.008
SUB	Surabaya	60.526.334
BPN	Balikpapan	56.510.444
BDJ	Banjarmasin	56.471.105
UPG	Makassar	60.245.355
LOP	Lombok	58.630.888
KJT	Kertajati	58.498.334

Berdasarkan Gambaran Umum Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Jemaah Haji Reguler, Data Jemaah Haji, Metode Perhitungan Aktuaria, serta Asumsi Perhitungan Aktuaria diperoleh hasil perhitungan aktuaria sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Hasil Perhitungan Aktuaria

Kontribusi	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kontribusi seluruh Jemaah	44.100.557.807	48.688.245.682	46.200.503.088
Kontribusi per Jemaah	220.104	243.001	230.585

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi per jemaah maka dapat dijadikan dasar untuk simulasi dengan tiga pendekatan yaitu:

Optimis	: Rp. 220.104,-
Moderate	: Rp. 234.001,-
Pesimis	: Rp. 230.585

5.8 Standar Biaya Penerbangan dan Proyeksi

Komponen biaya penerbangan Haji tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Detail komponen Biaya Penerbangan Haji

No	Cost Structure Tarif Penerbangan	%	2018	2019	2023	2024
	Total Biaya		27,495,842	30,079,285	32,743,992	33,427,838
1	Fuel Cost	41.9%	11,520,758	12,603,220	13,719,733	14,006,264
2	AC Lease (Sewa Pesawat)	36.5%	10,035,982	10,978,939	11,951,557	12,201,161
3	Liability Insurance	0.01%	2,750	3,008	3,274	3,343
4	Biaya Jasa Kebandaraan	2.1%	577,413	631,665	687,624	701,985
5	Biaya Jasa Navigasi Penerbangan	2.7%	742,388	812,141	884,088	902,552
6	Biaya Ground Handling	1.7%	467,429	511,348	556,648	568,273
7	Catering	1.4%	384,942	421,110	458,416	467,990
8	Biaya Persiapan Teknis Pesawat/Technical Handling	2.0%	549,917	601,586	654,880	668,557
9	Biaya Crew Langsung	1.6%	439,933	481,269	523,904	534,845
10	Transport Pax on Ground	0.4%	109,983	120,317	130,976	133,711
11	Biaya Staff Darat	0.9%	247,463	270,714	294,696	300,851
12	Crew Recruitment	0.1%	27,496	30,079	32,744	33,428
13	City Check-In Jeddah/Madinah	0.3%	82,488	90,238	98,232	100,284
14	Biaya Lain-lain	4.8%	1,319,800	1,443,806	1,571,712	1,604,536
	Insurance					
	Organization					
	PPMDC Charge (Terminal & System)					
	Passenger Service					
	Baggage Service					
15	Airpot Tax/ABC	3.7%	1,017,346	1,112,934	1,211,528	1,236,830

Sumber: Garuda 2023

Faktor yang paling mempengaruhi besarnya biaya penerbangan adalah faktor Avtur dan populasi pesawat yang sesuai kriteria usia maksimal 20 tahun dan daya tampung Jemaah atau pesawat besar. Jenis pesawat yang digunakan adalah B777 dan maskapai yang dipilih berdasarkan hasil lelang adalah Garuda Dana Saudi Airlines.

A. Faktor Komponen Biaya Avtur dan Perhitungannya

Berdasarkan data harga Avtur di Indonesia menunjukkan nilai tertinggi, Malaysia memiliki harga avtur 0.60 USD/L, Singapura memiliki harga 0.50 USD/L. Sedangkan Indonesia dengan rata-rata seluruh Embarkasi menghasilkan nilai harga Avtur 0.9 USD/L sehingga bisa disimulasikan berdasarkan data publikasi bahwa harga Avtur Indonesia bisa mencapai paling rendah 0.70 dan 0.85.

Tabel 5. 7 Biaya Avtur Malaysia, Singapura dan Indonesia

Rincian Komponen Biaya		
Komponen	Harga AVTUR	Satuan
☐Malaysia	0.60	USD
☐Singapura	0.50	USD
☐Indonesia -Min	0.75	USD
☐Indonesia -Mean	0.85	USD
☐Indonesia -Max	0.90	USD

Tabel 5. 8 Perhitungan Biaya Avtur Indonesia

Perhitungan Biaya Avtur	Nilai	satuan
❖Waktu Tempuh	10	jam
❖frekuensi	4	kali
❖B777 butuh Bahan Bakar	9000	liter/jam
❖Total Kebutuhan Avtur	360,000	Liter

Perhitungan biaya Avtur tergantung dari rata-rata waktu tempuh dan frekuensi pulang pergi yang dihitung dua kali sehingga total adalah 4 kali. Untuk pesawat B777 membutuhkan bahan bakau 9000 liter/jam dengan waktu tempuh 10 jam dan frekuensi 4 kali dan kebutuhan avtur 9000 liter/jam maka total kebutuhan avtur adalah 360 ribu liter.

Tabel 5. 9 Simulasi Perhitungan Biaya Avtur Indonesia

	Simulasi 1		Simulasi 2		Simulasi 3	
❖Biaya Avtur – min Indonesia	0.75	USD	0.85	USD	0.90	USD
❖Biaya Avtur Pesawat	270,000		306,000		324,000	
❖pax	400	seat	400	seat	400	seat
❖Biaya per pax	675	USD	765	USD	810	USD

Menghitung standard untuk biaya Avtur menggunakan tiga pendekatan yaitu harga Avtur 0.75, 0.85 dan 0.90 USD/Liter. Secara rata-rata rupiah harga Avtur dari seluruh Embarkasi adalah 0.90 USD/Liter.

B. Faktor Komponen Biaya Sewa Pesawat dan Perhitungannya

Standard biaya sewa pesawat yang digunakan Kementerian Agama adalah untuk tipe pesawat B777 sebesar 9000 USD/jam sehingga total dengan frekuensi 4 kali dan waktu tempuh 10 jam maka total biaya sewa adalah 360000 USD dibagi dengan total kapasitas pesawat 400 jemaah maka biaya sewa per jemaah adalah 900 USD. Mengacu pada standar *IATA Airline Cost Management Group (ACMG)* untuk B777 sebesar 9507 USD/Jam di tahun 2022 dengan sewa pesawat B777 sebesar 9507 USD/Jam maka biaya sewa per jemaah adalah 950.70 USD.

Tabel 5. 10 Simulasi Perhitungan Biaya Sewa Pesawat Indonesia

Biaya Sewa Pesawat	Simulasi 1 (Min)		Simulasi 2 (Max)	
✓B777	9,000	USD/Jam	9,507	USD/Jam
✓total sewa	360,000	USD	380,280	USD
✓Sewa per jemaah	900	USD	950.70	USD

C. Faktor Komponen Biaya Penerbangan

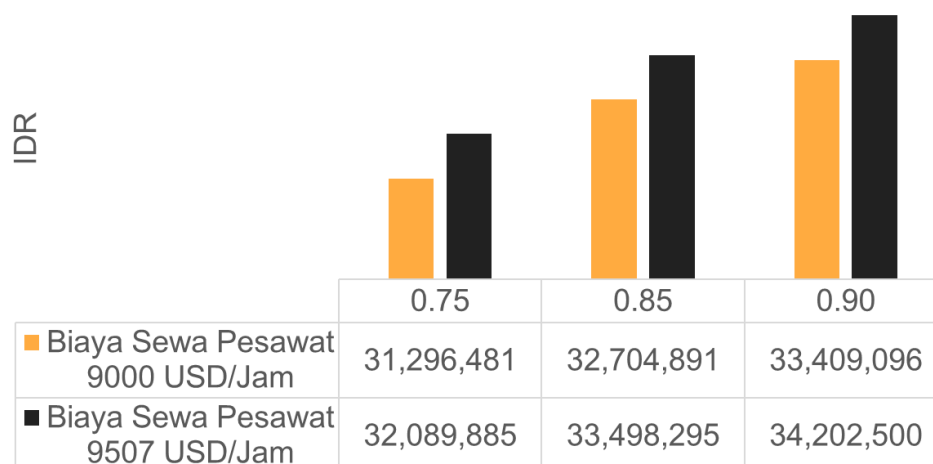
Berdasarkan list penyusun biaya penerbangan, maka ada yang perlu diverifikasi atau dikoreksi terkait biaya yang memang diperlukan atau tidak, sehingga menjadi fokus BPKH untuk menyesuaikan atau bahkan menghilangkan faktor yang dapat menjadi *redundant* dalam perhitungan.

Tabel 5. 11 Faktor Komponen Biaya Penerbangan

No	Cost Structure Tarif Penerbangan	%	2024	2025
	Total Biaya		33,427,838	
1	Fuel Cost	41.90%	14,006,264	41.90%
2	AC Lease	36.50%	12,201,161	36.50%
3	Liability Insurance	0.01%	3,343	X
4	Biaya Jasa Kebandaraan	2.10%	701,985	2.10%
5	Biaya Jasa Navigasi Penerbangan	2.70%	902,552	2.70%
6	Biaya Ground Handling	1.70%	568,273	1.70%
7	Catering	1.40%	467,990	1.40%
8	Biaya Persiapan Teknis Pesawat/Technical Handling	2.00%	668,557	2.00%
9	Biaya Crew Langsung	1.60%	534,845	1.60%
10	Transport Pax on Ground	0.40%	133,711	0.40%
11	Biaya Staff Darat	0.90%	300,851	0.90%
12	Crew Recruitment	0.10%	33,428	0.10%
13	City Check-In Jeddah/Madinah	0.30%	100,284	0.30%
14	Biaya Lain-lain	4.80%	1,604,536	4.80%
	Insurance			X
	Organization			X
	PPMDC Charge (Terminal & System)			
	Passenger Service			
	Baggage Service			
15	Airpot Tax/ABC	3.70%	1,236,830	3.70%

D. Hasil Simulasi Biaya Penerbangan

Hasil simulasi biaya penerbangan menunjukkan faktor yang paling dominan mempengaruhi biaya penerbangan adalah Avtur dan sewa pesawat. Hasil simulasi 1 dan 2 diperoleh nilai yang lebih rendah dari eksisting tahun 2024 (kurs hasil proyeksi 2025). Beberapa komponen usulan dihapus karena asuransi sudah dihitung pada asuransi khusus jiwa dan kecelakaan.



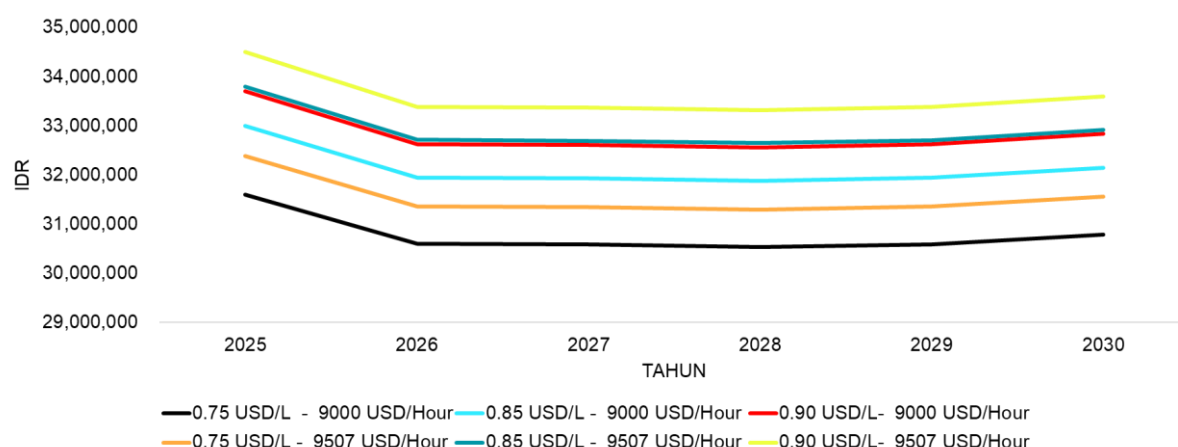
Gambar 5. 10 Kombinasi Biaya Penerbangan dengan Faktor Variasi Biaya Avtur dan Sewa Pesawat

E. Hasil Proyeksi Biaya Penerbangan

Faktor yang mempengaruhi proyeksi biaya penerbangan adalah Kurs Dollar (USD) dan Inflasi Rupiah (INA). Hasil proyeksi biaya penerbangan dalam periode tahun 2025 – 2030 sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Proyeksi Biaya Penerbangan Periode Tahun 2025 - 2030

Tahun	Total - biaya sewa pesawat 9000 USD/Hour			Total - biaya sewa pesawat 9507 USD/Hour		
	0.75 USD/L	0.85 USD/L	0.90 USD/L	0.75 USD/L	0.85 USD/L	0.90 USD/L
2025	31,594,080	33,002,490	33,706,695	32,387,484	33,795,894	34,500,099
2026	30,597,591	31,950,021	32,626,236	31,359,460	32,711,890	33,388,105
2027	30,583,315	31,935,655	32,611,825	31,345,134	32,697,474	33,373,644
2028	30,534,976	31,884,436	32,559,166	31,295,172	32,644,632	33,319,362
2029	30,595,112	31,947,632	32,623,892	31,357,032	32,709,552	33,385,812
2030	30,787,011	32,150,781	32,832,666	31,555,268	32,919,038	33,600,923



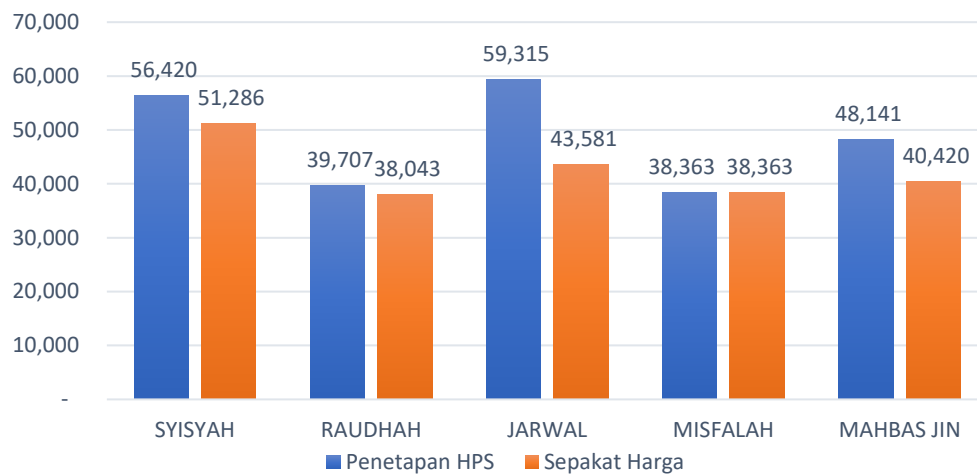
Gambar 5. 11 Proyeksi Biaya Penerbangan Periode Tahun 2025 - 2030

5.9 Standar Biaya Akomodasi Hotel di Makkah

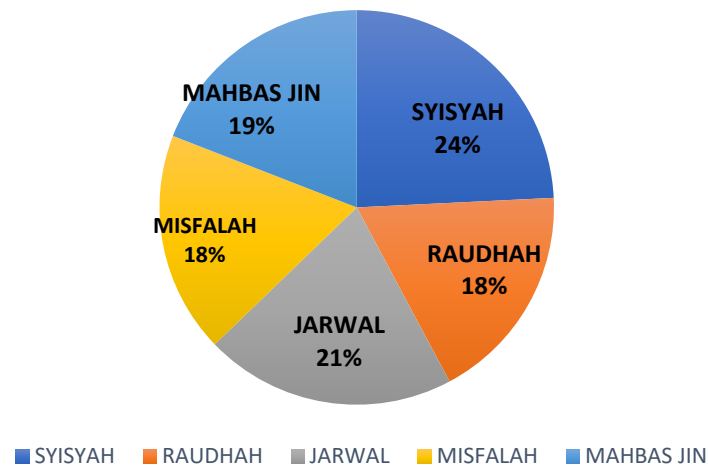
Rekapitulasi penetapan HPS calon penyedia akomodasi jemaah Haji Indonesia di Makkah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rekapitulasi Penetapan HPS Calon Penyedia Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 1444 H/2023 M

No.	Wilayah	Penetapan HPS					Sepakat Harga				
		Jml. Hotel	KPST.	HPS Tertinggi	HPS Terendah	HPS RERATA	Jml. Hotel	KPST.	Harga	Rerata	%
1	SYISYAH	42	56,420	SAR 4,362	SAR 3,000	SAR 4,148	35	51,286	SAR 202,227,995.00	SAR 3,943.14	24.23%
2	RAUDHAH	21	39,707	SAR 4,493	SAR 4,173	SAR 4,369	20	38,043	SAR 158,469,890.00	SAR 4,165.55	17.97%
3	JARWAL	15	59,315	SAR 4,862	SAR 4,500	SAR 4,749	9	43,581	SAR 196,973,260.00	SAR 4,519.70	20.59%
4	MISFALAH	27	38,363	SAR 4,779	SAR 4,268	SAR 4,536	27	38,363	SAR 163,908,260.00	SAR 4,272.56	18.12%
5	MAHBAS JIN	23	48,141	SAR 4,888	SAR 4,314	SAR 4,666	20	40,420	SAR 178,483,810.00	SAR 4,415.73	19.09%
		128	241,946				111	211,693	SAR 900,063,215.00	SAR 4,251.74	100.00%
5	Cadangan						4	1,632	SAR 4,226,050.00	SAR 2,589.49	



Gambar 5. 12 Proses Penetapan HPS dan Sepakat Harga Calon Penyedia Akomodasi di Makkah

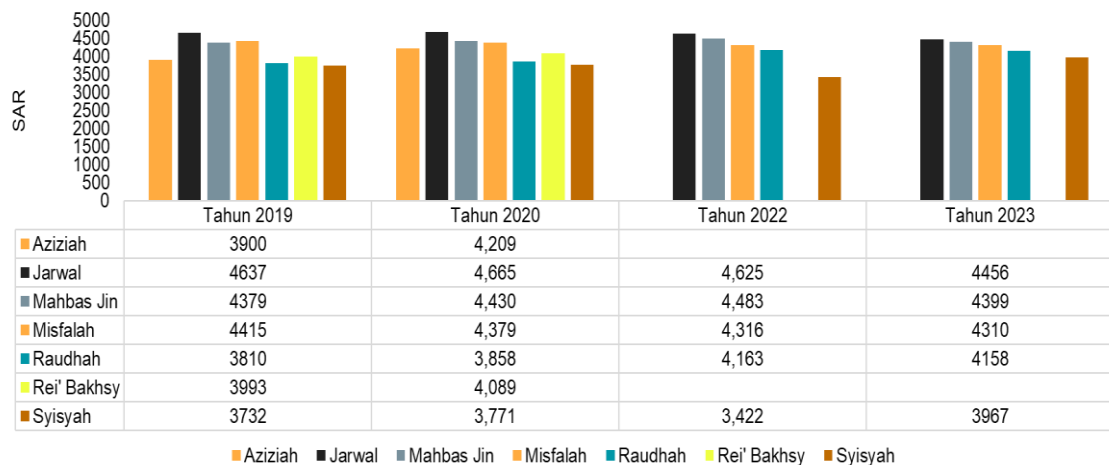


Gambar 5. 13 Wilayah Akomodasi Sepakat Harga

Hasil sebaran jemaah haji dibeberapa wilayah sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Data Sebaran Jemaah Haji Indonesia per Wilayah Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2022	2023
Aziziah	1%	4%		
Jarwal	16%	15%	25%	21%
Mahbas Jin	17%	19%	19%	19%
Misfalah	18%	16%	19%	18%
Raudhah	15%	15%	21%	18%
Rei' Bakhsy	6%	8%		
Syisyah	27%	24%	15%	24%



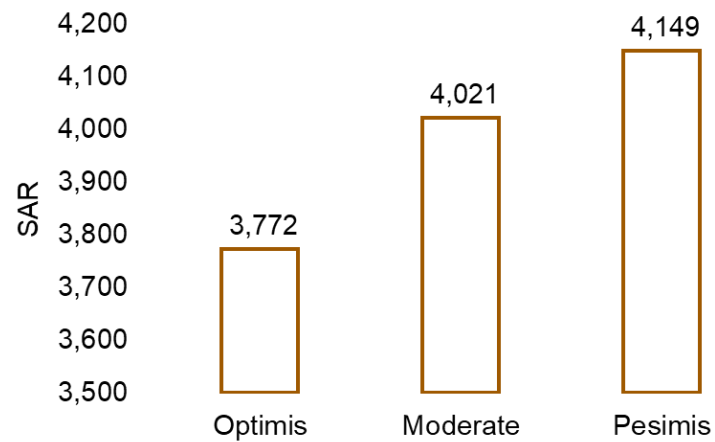
Gambar 5. 15 Rata-rata Biaya Akomodasi Makkah per Wilayah

Gambar diatas merupakan sebaran Jemaah haji per wilayah akomodasi selama di Makkah, untuk memperoleh harga yang lebih murah seharusnya sebaran Jemaah Haji dioptimalkan pada wilayah yang sedikit jauh dari kompleks Makkah dengan harga rata-rata termurah di wilayah Syisyah, ReBakhshy dan Aziziah. Terlihat pada tahun 2023 wilayah yang dipilih memiliki nilai diatas 4000 hal ini yang menyebabkan harga akomodasi di Makkah naik. Jika dilakukan simulasi dengan penempatan sebaran di wilayah yang memiliki harga lebih murah sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Simulasi Penempatan Jemaah Haji berdasarkan Wilayah

Wilayah	Simulasi 1	Simulasi 2
AZIZIAH	8%	5%
JARWAL	8%	1%
MAHBAS JIN	8%	2%
MISFALAH	8%	2%
RAUDHAH	8%	20%
REI BAKHSY	8%	10%
SYISYAH	50%	60%

Setelah dilakukan simulasi penempatan jemaah Haji berdasarkan wilayah, maka hasil standar biaya akomodasi Hotel di Makkah menjadi sebagai berikut:



Gambar 5. 16 Standar Biaya Akomodasi Hotel di Makkah

Optimalisasi terhadap wilayah yang memiliki harga rata-rata terendah dengan nilai kasfiyah yang sesuai sehingga inti dari nilai harga akomodasi Makkah adalah optimalisasi sebaran jemaah Haji di wilayah sekitaran Masjidil Haram dan Armuzna.

Faktor yang mempengaruhi proyeksi biaya akomodasi hotel di Makkah adalah Kurs SAR dan Inflasi KSA dengan asumsi faktor lain tetap.

Tabel 5. 16 Hasil Proyeksi Biaya Akomodasi Hotel di Makkah Tahun 2025 – 2030

Tahun	Inflasi	Total Jemaah	Optimis		Moderate		Pesimis	
			Harga	BPIH	Harga	BPIH	Harga	BPIH
2025	2.361	219,463	3,871	3,549,109,445,466.57	4,111	3,769,125,266,432.89	4,239	3,886,365,110,927
2026	2.656	219,463	3,883	3,437,675,444,088.21	4,122	3,649,106,208,051.70	4,250	3,762,357,554,979
2027	2.661	219,463	3,883	3,437,017,750,454.54	4,122	3,648,378,209,723.98	4,250	3,761,602,416,780
2028	2.661	219,463	3,883	3,428,495,514,524.82	4,122	3,639,331,896,285.54	4,250	3,752,275,358,965
2029	2.661	219,463	3,883	3,431,052,185,289.28	4,122	3,642,045,790,303.95	4,250	3,755,073,476,297
2030	2.661	219,463	3,883	3,460,880,011,043.16	4,122	3,673,707,887,338.39	4,250	3,787,718,178,649
Inflasi Tertinggi	5.00	219,463	3,981	3,649,860,138,443.90	4,210	3,860,606,798,850.46	4,339	3,978,330,672,617
Penghematan			10.50%		4.95%		2.03%	
			405,457,884,112		191,117,075,448		78,597,593,157	

Hasil proyeksi sudah memperhitungkan inflasi KSA, SAR dan skenario kenaikan harga maksimal dengan inflasi tertinggi 5% (klaim pengusaha hotel). Penetapan harga sangat bergantung pada variasi harga di wilayah sekitaran Masjidil Haram.

Rekomendasi :

- ☐ Harga tinggi karena pemilihan hotel dengan wilayah yang berada dekat dengan area Masjidil Haram
- ☐ Harga bisa lebih rendah lagi, dengan syarat adanya data seluruh data hotel dengan harga di setiap wilayah sehingga bisa dilakukan simulasi yang menghasilkan harga optimal dan efisiensi terbaik. Sehingga penetapan harga akomodasi Makkah tidak tergantung lagi dengan keputusan DPR RI.

5.10 Standar Biaya Akomodasi Hotel di Madinah

Peta akomodasi hotel jemaah Haji Indonesia di Madinah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 5. 17 Sebaran Akomodasi Hotel di Madinah

Berikut data akomodasi hotel di Madinah:

Tabel 5. 17 Penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Akomodasi di Madinah Tahun 1444H/2023M

WILAYAH	JARAK	NILAI	LIFT	NILAI	GRADE	NILAI	SCORE	HPS
UTARA	0-200 M	92.0	10 S.D. 15	5	A	3	100.0	96.5-100 SAR 1,350
	200 - 400 M	90.0	6 S.D. 9	4	B	2	96.0	91.5-96 SAR 1,325
	400 - 800 M	88.0	1 S.D. 5	2	C	1	91.0	86-91 SAR 1,300
BARAT	0-200 M	90.0	10 S.D. 15	5	A	3	98.0	94.5-98 SAR 1,325
	200 - 400 M	88.0	6 S.D. 9	4	B	2	94.0	89.5-94 SAR 1,300
	400 - 800 M	86.0	1 S.D. 5	2	C	1	89.0	87-89 SAR 1,275
SELATAN	0-200 M	88.0	10 S.D. 15	5	A	3	96.0	92.5-96 SAR 1,275
	200 - 400 M	86.0	6 S.D. 9	4	B	2	92.0	87.5-92 SAR 1,250
	400 - 800 M	84.0	1 S.D. 5	2	C	1	87.0	85-87 SAR 1,225

Tabel 5. 18 Rekapitulasi Penetapan HPS Calon Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 1444 H/2023 M

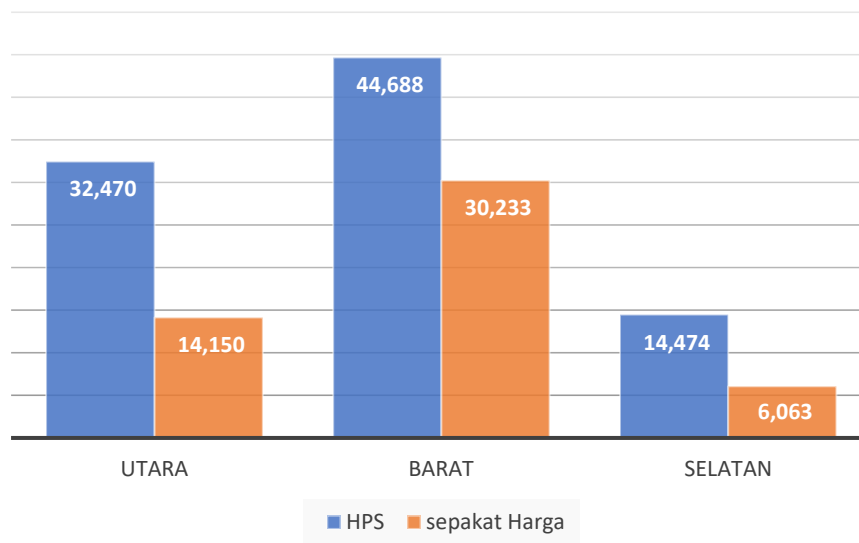
No.	Wilayah	Penetapan HPS					Sepakat Harga		
		Jml. Hotel	KPST.	HPS Tertinggi	HPS Terendah	HPS RERATA	Jml. Hotel	KPST.	Harga
1	Utara	21	32,470	SAR 5,400	SAR 5,300	SAR 5,390	14	23,699	SAR 90,456,600
2	Barat	58	44,688	SAR 5,300	SAR 5,200	SAR 5,238	47	35,973	SAR 142,262,700
3	Selatan	18	14,474	SAR 5,100	SAR 5,000	SAR 5,045	10	6,903	SAR 25,839,300
		97	91,632				71	66,575	SAR 258,558,600

Tabel 5. 19 Asumsi Penempatan Jemaah Haji di Madinah

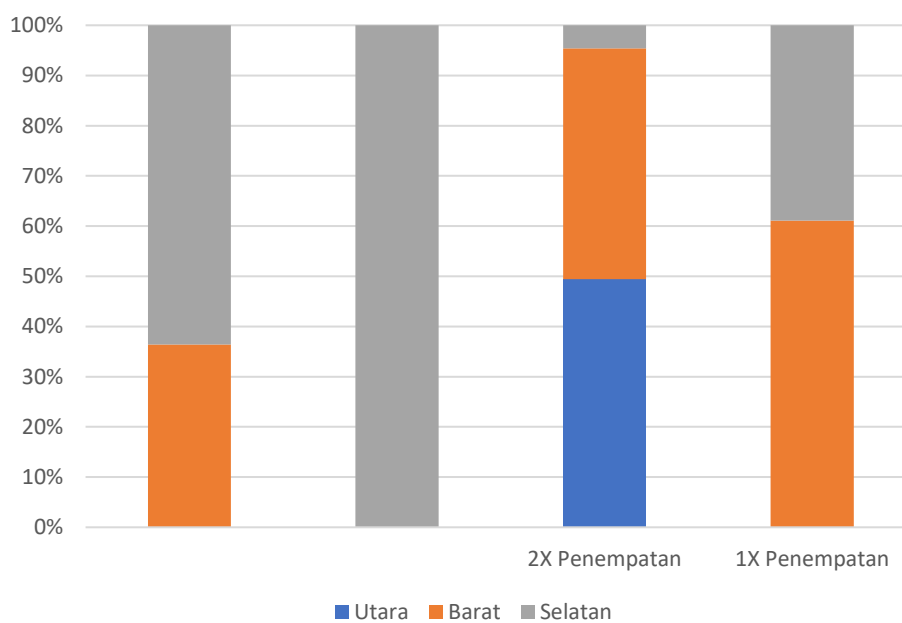
No.	Wilayah	Penempatan 4X			Penempatan 3X			Penempatan 2X			Penempatan 1X			Total Penempatan	
		Jml. Hotel	Kpst.	Rerata	Jml. Hotel	Kpst.	Rerata	Jml. Hotel	Kpst.	Rerata	Jml. Hotel	Kpst.	Rerata	Jml. Hotel	KPST.
1	Utara	11	50,608	SAR 1,236	-	-	#DIV/0!	3	22,094	SAR 1,264	-	-	#DIV/0!	14	72,702
2	Barat	27	88,372	SAR 1,204	4	6,822	SAR 1,200	15	20,572	SAR 1,268	1	1,320	SAR 1,200	47	117,086
3	Selatan	6	17,772	SAR 1,150	1	1,800	SAR 1,175	2	2,040	SAR 1,138	1	840	SAR 1,150	10	22,452
		44	156,752	189380500	5	8,622	10301400	20	44,706	56326700	2	2,160	2550000	71	212,240

Tabel 5. 20 Biaya HPS Hotel di Madinah

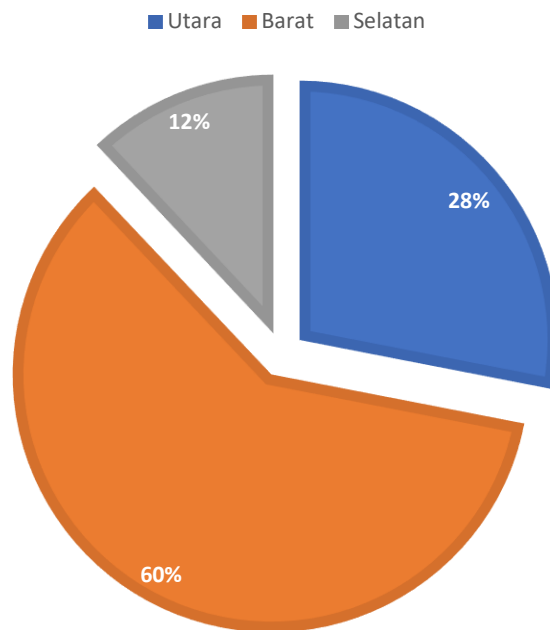
WAKTU				WILAYAH				KASYFIAH				HPS	
Kode	Masa Tinggal	Bobot	SAR	Kode	Letak Hotel	Bobot	SAR	Kode	Nilai Kasyfiah	Bobot	SAR	%	SAR
A	peak season	65%	861.25	D	syimaliyah	50%	663	G	>90	45%	596	160%	2120
B	mid season	20%	265	E	Gharbiyah	30%	398	H	80-89	30%	398	80%	1060
C	low season	15%	199	F	Janubiyah	20%	265	I	<80	25%	331	60%	795
		100%	1325			100%	1325			100%	1325		3975
													1325



Gambar 5. 18 Proses Penetapan HPS dan Sepakat Harga Calon Penyedia Akomodasi di Madinah



Gambar 5. 19 Penempatan JHI Akomodasi di Madinah



Gambar 5. 20 Wilayah Akomodasi Sepakat Harga di Madinah

Hasil proyeksi biaya akomodasi jemaah Haji di Madinah tahun 2025 -2030 sebagai berikut:

Tabel 5. 21 Proyeksi Standar Biaya Akomodasi di Madinah Tahun 2025 -2030

Komponen			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Inflasi Tertinggi
Inflasi (%)			2.361	2.656	2.661	2.661	2.661	2.661	5.00
Standard Harga	Optimis	1,196	1,224	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,256
	Moderate	1,217	1,246	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,278
	Pesimis	1,325	1,356	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,391

Penentuan standar biaya akomodasi di Madinah sangat menantang karena tidak hanya dipengaruhi oleh faktor Inflasi, Kurs dan sebaran Hotel di beberapa wilayah namun juga dipengaruhi oleh faktor musim.

Rekomendasi:

- ☐ Harga tinggi karena pemilihan Hotel dengan wilayah yang berada dekat dengan area Masjidil Haram.
- ☐ Harga bisa lebih rendah lagi, dengan syarat adanya data seluruh hotel dengan harga di setiap wilayah sehingga bisa dilakukan simulasi yang menghasilkan harga optimal dan efisiensi terbaik.

Tabel 5. 22 Hasil Proyeksi BPIH di Madinah Tahun 2025 – 2030

Tahun	Optimis			Moderate		Pesimis	
	Total Jemaah	Per Jemaah	BPIH	Per Jemaah	BPIH	Per Jemaah	BPIH
2025	219,463	1,224	1,122,518,682,233	1,246	1,142,228,458,426	1,356	1,243,593,021,704
2026	219,463	1,228	1,086,958,432,662	1,249	1,106,043,823,202	1,360	1,204,197,260,266
2027	219,463	1,228	1,086,744,856,579	1,249	1,105,826,497,038	1,360	1,203,960,647,966
2028	219,463	1,228	1,084,050,225,147	1,249	1,103,084,551,843	1,360	1,200,975,374,849
2029	219,463	1,228	1,084,858,614,573	1,249	1,103,907,135,397	1,360	1,201,870,956,780
2030	219,463	1,228	1,094,289,824,585	1,249	1,113,503,943,579	1,360	1,212,319,412,688
Inflasi Tertinggi	219,463	1,256	1,151,463,632,701	1,278	1,171,681,639,630	1,391	1,275,659,960,978
Efisiensi	11%			8%			
	130,634,371,653			98,720,377,462			

5.11 Standar Biaya Akomodasi Jemaah Haji di Embarkasi

Untuk layanan akomodasi di embarkasi hasil temuan di lapangan adalah kondisi jemaah menunggu di Aula Embarkasi bisa menghabiskan lebih dari satu botol minuman, sehingga pihak Embarkasi menambah porsi air mineral yang dananya tidak masuk kedalam rincian akomodasi, sehingga menggunakan dana swadaya untuk menambah air mineral botol. Kondisi sarana dan prasarana tempat menginap di Embarkasi setara dengan Hotel Bintang-2. Sehingga untuk pembandingan harga pelayanan Hotel Bintang-2 di beberapa tempat dengan variasi harga mulai dari Rp.198.000,- sampai dengan Rp.230.000,-. Sangat memungkinkan untuk meningkatkan nilai akomodasi Embarkasi untuk peningkatan pelayanan jemaah Haji.

Tabel 5. 23 Biaya Akomodasi Jemaah Haji di Embarkasi

Rincian Biaya Akomodasi			Biaya (Rp)
Total Biaya Akomodasi			125,000.00
1	Laundry Linen	per jemaah	20,000.00
2	Sandal		6,000.00
3	Amenities (soap, shampoo, dentalkit)		6,000.00
4	Gula, Kopi, Teh, Creamer		6,000.00
5	Air Mineral Botol		3,000.00
6	Air Galon		1,000.00
7	Peningkatan Fasilitas (Pengadaan Handuk, Sprei, Bantal, dll.)	Cost Sharing	50,000.00
8	Layanan Kebersihan (Chemical, alat kebersihan, tenaga musiman)		25,000.00
9	Fasilitas Ramah Lansia		8,000.00

Jika dibandingkan dengan rata-rata harga Hotel Bintang-2 yang memiliki kelengkapan yang sama dengan penginapan Embarkasi maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Rataan Harga Hotel Bintang-2 di Wilayah Jakarta, Makassar dan Medan

List Harga Hotel Bintang 2	Rata-rata	Hotel 1	Hotel 2	Hotel 3
Jakarta	229,645	211,992	263,138	213,804
Makassar	182,163	168,000	157,500	220,990
Medan	224,427	177,840	224,609	270,832

Sehingga beberapa usulan simulasi untuk biaya akomodasi di Embarkasi sebagai berikut:

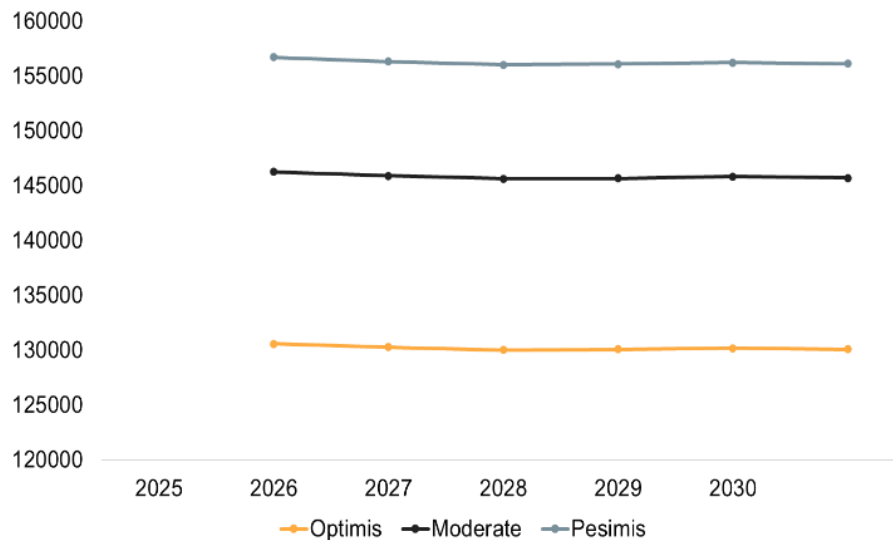
Tabel 5. 25 Rentang Biaya Akomodasi di Embarkasi

AKOMODASI		Batas Bawah	Tengah	Batas Atas
		125,000	140,000	150,000
1 Laundry Linen	per jemaah	20,000	20,000	20,000
2 Sandal		6,000	6,000	6,000
3 Amenities (soap, shampoo, dentalkit)		6,000	6,000	6,000
4 Gula, Kopi, Teh, Creamer		6,000	6,000	6,000
5 Air Mineral Botol		3,000	5,000	5,000
6 Air Galon		1,000	2,000	2,000
7 Peningkatan Fasilitas (Pengadaan Handuk, Sprei, Bantal, dll.)	Cost Sharing	50,000	55,000	65,000
8 Layanan Kebersihan (Chemical, alat kebersihan, tenaga musiman)		25,000	30,000	30,000
9 Fasilitas Ramah Lansia		8,000	10,000	10,000

Hasil proyeksi menggunakan data proyeksi hasil inflasi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor Inflasi dan hasil proyeksi inflasi tahun 2025 – 2030 maka rata-rata kenaikan biaya di 4%. Sehingga angka kenaikan paling maksimum untuk akomodasi di Embarkasi Rp.156 ribu. Angka kenaikan akomodasi Embarkasi belum bisa setara dengan Hotel Bintang-2 atau Bintang-3 karena belum meratanya sarana dan prasarana di seluruh Embarkasi.

Tabel 5. 26 Proyeksi Biaya Akomodasi di Embarkasi Tahun 2025-2030

Tahun	Inflasi-INA	Optimis	Moderate	Pesimis
2025	4.4756	130,595	146,266	156,713
2026	4.2224	130,278	145,911	156,334
2027	4.0314	130,039	145,644	156,047
2028	4.0624	130,078	145,687	156,094
2029	4.1614	130,202	145,826	156,242
2030	4.0866	130,108	145,721	156,130



Gambar 5. 21 Proyeksi Biaya Akomodasi di Embarkasi Tahun 2025-2030

Rekomendasi penentuan standar biaya setara dengan Hotel Bintang-2 atau Hotel Bintang-3 untuk seluruh kamar di Embarkasi, sehingga kenaikan harga akan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan di Embarkasi.

5.12 Standar Biaya Konsumsi di Arab Saudi

Berdasarkan hasil survei Arab Saudi di Makkah dan Madinah, maka ada potensial untuk kenaikan biaya konsumsi dikisaran 5%, 7%, dan 10%. Namun untuk porsi makanan akan menyesuaikan dengan ketetapan harga yang sudah disepakati dengan DPR. Gramasi dari total nilai yang sesuai dengan harga makanan. Berikut data konsumsi Arab Saudi:

Harga Konsumsi per kali makan siang & malam	9,89
Jumlah	9,89
Komponen	
BOP 15%	1,48
Profit 20%	1,98
Baladiyah 2,5 %	0,25
Zakat 2,5 %	0,25
Resiko 5%	0,49
Jumlah sebelum pajak	14,34
Pajak 15 %	2,15
Jumlah setelah pajak	16,50

Harga Konsumsi per kali makan pagi	6,00
Jumlah	6,00
Komponen	
BOP 15%	0,90
Profit 20%	1,20
Baladiyah 2,5 %	0,15
Zakat 2,5 %	0,15
Resiko 5%	0,30
Jumlah sebelum pajak	8,70
Pajak 15 %	1,30
Jumlah setelah pajak	10,00

Harga Konsumsi per kali makan Selamat Datang & Selamat Jalan	9,89
Jumlah	9,89
Komponen	
BOP 15%	1,48
Profit 20%	1,98
Baladiyah 2,5 %	0,25
Zakat 2,5 %	0,25
Resiko 5%	0,49
Jumlah sebelum pajak	14,34
Pajak 15 %	2,15
Jumlah setelah pajak	16,50

Tabel 5. 27 Menu Makan Pagi Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH TAHUN 1444H/2023 M													
SENIN	9.146	SELASA	8.216	RABU	8.926	KAMIS	8.360	JUMAT	10.003	SABTU	9.829	MINGGU	9.120
MAKAN PAGI													
	7.779		6.719		7.559		6.492		8.601		8.462		7.623
Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Kuning 150 gr	1.712	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Uduk 150 gr	1.486	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Goreng 150 gr	2.225	Mie Goreng 150 gr	4.061
Semur Ayam 100 gr	6.456	Telur Dadar Daging Cincang 100 gr	5.007	Ikan Tuna Cabe Hijau 100 gr	6.236	Telur Dadar Daging Cincang 100 gr	5.007	Daging Sapi Masak Habang 100 gr	7.278	Ikan Tuna Cabe Hijau 100 gr	6.236	Telur Dadar Mix (Jagung, Wortel, Kacang Polong) 100 gr	3.561
	1.367		1.497		1.367		1.868		1.401		1.367		1.497
Pisang	0.795	Apel	0.926	Pisang	0.795	Pear	1.296	Jeruk	0.830	Pisang	0.795	Apel	0.926
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Tabel 5. 28 Menu Makan Siang Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH TAHUN 1444H/2023 M													
MAKAN SIANG													
SENIN	7.941	SELASA	13.198	RABU	9.835	KAMIS	8.928	JUMAT	12.562	SABTU	12.201	MINGGU	10.390
	6.540		11.831		8.434		7.430		10.694		10.800		9.023
Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Arab 150 gr	3.330	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323
Ikan Patin Goreng Bumbu Kuning 100 gr	3.996	Rendang Daging 100 gr	8.048	Ayam Gulai 100 gr	5.646	Ikan Patin Bumbu Pindang 100 gr	3.647	Ayam Panggang 100 gr	5.719	Daging Sapi Lada Hitam 100 gr	8.189	Ayam Opor 100 gr	5.800
Tumis Timun Wortel 100 gr	1.221	Tumis Jamur Cabe Merah 100 gr	2.460	Tumis Labu Air Paprika Merah 100 gr	1.465	Tumis Jamur Cabe Merah 100 gr	2.460	Acar Timun Wortel 100 gr	1.646	Tumis Wortel Kacang Polong 100 gr	1.288	Tumis Kembang Kol Wortel	1.900
	1.401		1.367		1.401		1.497		1.868		1.401		1.367
Jeruk	0.830	Pisang	0.795	Jeruk	0.830	Apel	0.926	Pear	1.296	Jeruk	0.830	Pisang	0.795
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Tabel 5. 29 Menu Makan Malam Jemaah Haji Indonesia di Makkah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH TAHUN 1444H/2023 M													
MAKAN MALAM													
SENIN	14.185	SELASA	15.602	RABU	12.596	KAMIS	12.254	JUMAT	9.412	SABTU	11.621	MINGGU	10.620
	11.026		12.909		9.807		9.595		6.623		8.462		7.927
Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Arab	3.330	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323
Daging Masak Lombok Ijo 100 gr	7.312	Ayam Goreng Tepung 100 gr	7.933	Semur Daging 100 gr	7.332	Ayam Goreng Saos Mentega 100 gr	4.532	Ikan Fillet Dori Bumbu Asam Manis 100 gr	4.148	Ayam Goreng Bumbu Rica-Rica 100 gr	5.521	Ikan Fillet Dori Goreng Tepung 100 gr	4.221
Orek Tempe Cabe Merah 100 gr	2.390	Acar Timun Wortel 100 gr	1.646	Sambal Kentang Mustofa 100 gr	1.152	Tempe Teri Orak Arik 100 gr	3.740	Sambal Kentang Mustofa 100 gr	1.152	Oseng Tempe Cabe Hijau 100 gr	1.618	Terong Balado 100 gr	2.384
	3.159		2.693		2.789		2.659		2.789		3.159		2.693
Pear	1.296	Jeruk	0.830	Apel	0.926	Pisang	0.795	Apel	0.926	Pear	1.296	Jeruk	0.830
Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Tabel 5. 30 Menu Makan Pagi Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MADINAH TAHUN 1444H/2023 M													
SENIN	8.086	SELASA	9.057	RABU	7.188	KAMIS	6.935	JUMAT	10.057	SABTU	8.360	MINGGU	9.995
MAKAN PAGI													
	6.719		7.559		5.787		5.568		8.655		6.492		8.593
Nasi kuning 150 gr	1.712	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Goreng 150 gr	2.225	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Uduk 150 gr	1.486	Mie Goreng 150 gr	4.061
Telur Dadar Daging Cincang 100 gr	5.007	Ikan Tuna Cabe Hijau 100 gr	6.236	Telur Dadar Mix Vegetable (Jagung, Wortel, Kacang Polong) 100 gr	3.561	Ikan Fillet Dori Bumbu Asam Pedas 100 gr	4.245	Semur Daging 100 gr	7.332	Telur Dadar Daging Cincang 100 gr	5.007	Ayam Goreng Saos Mentega 100 gr	4.532
	1.367		1.497		1.401		1.367		1.401		1.868		1.401
Pisang	0.795	Apel	0.926	Jeruk	0.830	Pisang	0.795	Jeruk	0.830	Pear	1.296	Jeruk	0.830
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Tabel 5. 31 Menu Makan Siang Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MADINAH TAHUN 1444H/2023 M													
MAKAN SIANG													
SENIN	8.256	SELASA	10.683	RABU	11.878	KAMIS	10.270	JUMAT	10.277	SABTU	10.571	MINGGU	9.571
	6.854		8.815		10.511		8.869		8.780		9.170		7.703
Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323
Ikan Patin Goreng Bumbu Rica-Rica 100 gr	3.071	Opor Ayam 100 gr	5.800	Daging Kalio 100 gr	7.724	Ayam Gulai 100 gr	5.646	Ikan Tuna Cabe Hjau 100 gr	6.236	Ayam Woku 100 gr	5.386	Ikan Patin Bumbu Kuning 100 gr	3.996
Tumis Jamur Cabe Merah 100 gr	2.460	Tumis Mix Vegetables (jagung,kacang polong, wortel,) 100 gr	1.692	Tumis Labu Air Paprika Merah 100 gr	1.465	Tumis Kembang Kol Wortel 100 gr	1.900	Tumis Timun Wortel 100 gr	1.221	Tumis Jamur Cabe Merah 100 gr	2.460	Terong Balado 100 gr	2.384
	1.401		1.868		1.367		1.401		1.497		1.401		1.868
Jeruk	0.830	Pear	1.296	Pisang	0.795	Jeruk	0.830	Apel	0.926	Jeruk	0.830	Pear	1.296
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Tabel 5. 32 Menu Makan Malam Jemaah Haji Indonesia di Madinah Tahun 2023

MENU KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MADINAH TAHUN 1444H/2023 M													
MAKAN MALAM													
SENIN	11.398	SELASA	14.137	RABU	12.619	KAMIS	13.822	JUMAT	15.558	SABTU	9.748	MINGGU	15.127
	8.238		11.479		9.830		10.663		10.694		7.089		12.338
Nasi Putih 150 gr	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323	Nasi Arab	3.330	Nasi Putih	1.323	Nasi Putih	1.323
Ayam Goreng Pedas Manis 100 gr	5.764	Daging Bumbu Tongseng 100 gr	7.766	Ayam Goreng Bumbu Kecap 100 gr	5.540	Daging Sapi Lada Hitam 100 gr	8.189	Ayam Panggang 100 gr	5.719	Ikan Fillet Dori Bumbu Asam Manis 100 gr	4.148	Rendang Daging 100 gr	8.048
Sambel Kentang Mustofa 100 gr	1.152	Tempe Orak Arik Cabe Merah 100 gr	2.390	Teri Kacang Balado 100 gr	2.967	Sambel Kentang Mustofa 100 gr	1.152	Acar Timun Wortel 100 gr	1.646	Oseng Tempe Cabe Hijau 100 gr	1.618	Teri Kacang Balado 100 gr	2.967
	3.159		2.659		2.789		3.159		4.863		2.659		2.789
Pear	1.296	Pisang	0.795	Apel	0.926	Pear	1.296	Kurma Ajwa 9 butir	3.000	Pisang	0.795	Apel	0.926
Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292	Puding	1.292
Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571	Air Mineral 600 ml	0.571

Standard biaya untuk konsumsi selama di Arab Saudi menggunakan proyeksi inflasi tahun 2025-2030 dan inflasi maksimal 5% berdasarkan asumsi pelaku usaha saat survei lapangan.

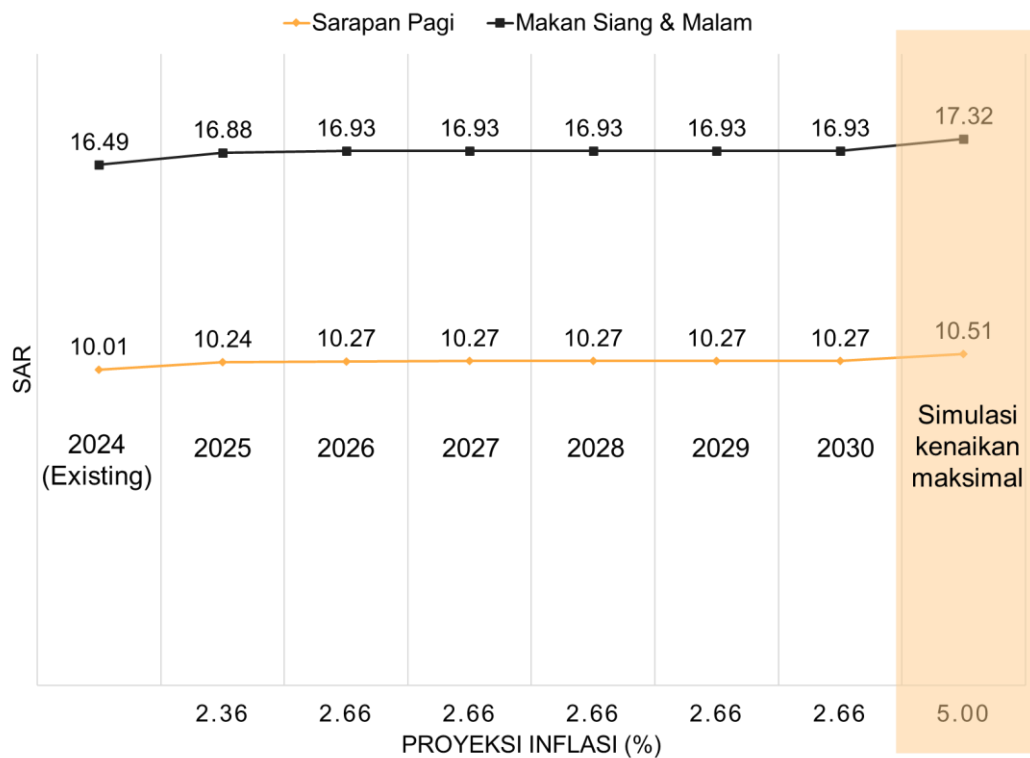
Tabel 5. 33 Hasil Proyeksi Biaya Makan Untuk Kategori Sarapan Pagi

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflasi		2.361	2.656	2.661	2.661	2.661	2.661
Harga Makan Pagi	6.00	6.14	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
jumlah	6.00	6.14	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
Komponen							
BOP 15%	0.90	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Profit 20%	1.20	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Baladiyah 2,5%	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Zakat 2,5%	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Resiko 5%	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Jumlah sebelum Pajak	8.70	8.91	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93
Pajak 15%	1.31	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Jumlah setelah pajak	10.0	10.24	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27

Hasil perhitungan proyeksi standar biaya makan untuk kategori makan siang dan makan malam berdasarkan proyeksi inflasi tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Proyeksi Standar Biaya Makan Siang dan Makan Malam berdasarkan Proyeksi Inflasi Tahun 2025-2030

Tahun	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflasi		2.361	2.656	2.661	2.661	2.661	2.661
Harga Makan Siang dan Malam	9.89	10.12	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
jumlah	9.89	10.12	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
Komponen							
BOP 15%	1.48	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
Profit 20%	1.98	2.02	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
Baladiyah 2,5%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zakat 2,5%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Resiko 5%	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
Jumlah sebelum Pajak	14.34	14.68	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
Pajak 15%	2.15	2.20	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
Jumlah setelah pajak	16.5	16.88	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93



Gambar 5. 22 Hasil Proyeksi Biaya Makan di Arab Saudi

5.13 Simulasi Perhitungan Standar Biaya Layanan Masyair

Simulasi didasarkan atas sebaran jemaah Haji di Armuzna. Biaya pelayanan Haji di Armuzna merupakan yang paling signifikan terhadap efisiensi BPIH, sehingga dapat dijadikan usulan rekomendasi untuk beberapa alternatif sebaran jemaah yang tidak seluruhnya berada di Armuzna.

Tabel 5. 35 Simulasi Perhitungan Standar Biaya Layanan Masyair

		1 SAR = IDR 4,160			
Simulasi	Harga Tahun 2024	Total Jemaah	Total Biaya (IDR)	Penghematan	Biaya Per jemaah
Layanan Masyair (100%)	4,267.75	219,463	3,896,310,987,920		
Simulasi 1 (50%) Masyair		109,732	1,948,155,493,960	50%	2,134
Simulasi 2 (60%) Masyair		131,678	2,337,786,592,752	40%	2,561
Simulasi 3 (70%) Masyair		153,624	2,727,417,691,544	30%	2,987

Pada Tabel hasil simulasi menunjukkan semakin efektif sebaran akomodasi jemaah di Armuzna dan di luar area, maka akan signifikan terhadap efisiensi pembiayaan BPIH.

Berikut proyeksi biaya akomodasi layanan Masyair tahun 2025-2030:

Tabel 5. 36 Proyeksi Biaya Akomodasi Layanan Masyair Tahun 2025-2030

Tahun	Inflasi	SAR	Layanan Masyair (100%)	Simulasi 1 (50%) Masyair	Simulasi 2 (60%) Masyair	Simulasi 3 (70%) Masyair
2025	2.361	4,178	4,005,542,730,851	1,001,385,682,713	1,441,995,383,106	1,962,715,938,117
2026	2.656	4,034	3,878,651,213,206	969,662,803,302	1,396,314,436,754	1,900,539,094,471
2027	2.661	4,033	3,877,889,098,383	969,472,274,596	1,396,040,075,418	1,900,165,658,208
2028	2.661	4,023	3,868,273,702,652	967,068,425,663	1,392,578,532,955	1,895,454,114,299
2029	2.661	4,026	3,871,158,321,356	967,789,580,339	1,393,616,995,688	1,896,867,577,465
2030	2.661	4,061	3,904,812,206,415	976,203,051,604	1,405,732,394,310	1,913,357,981,144
Inflasi Tertinggi	5.000	4,178	4,108,828,527,141	1,027,207,131,785	1,479,178,269,771	2,013,325,978,299
Efisiensi				75%	65%	51%

BAB VI REKOMENDASI

1. Rekomendasi Terhadap Biaya Konsumsi

- ☐ Untuk list biaya konsumsi dalam negeri perlu dijabarkan seperti yang diperoleh data list biaya konsumsi di Arab Saudi sehingga bisa diprediksi indikator yang bisa menyebabkan kenaikan harga.
- ☐ Kenaikan harga konsumsi di Arab Saudi akan mengikuti inflasi dan proyeksi dari pelaku usaha, sehingga perlu bisa dilakukan proyeksi beberapa tahun kedepan.
- ☐ Konsumsi di Indonesia sebesar Rp.60ribu per 1 kali makan hasil survei masih memadai sehingga rekomendasi tidak dinaikkan dan data detail penjabaran list biaya makan tidak ada.

2. Rekomendasi Terhadap Akomodasi Penginapan Arab Saudi

- ☐ Survei harga hotel di Arab Saudi lebih baik mendekati pelaksanaan Haji agar diperoleh lebih banyak variasi harga di semua wilayah Makkah dan Madinah.
- ☐ Metode perhitungan standar biaya kedepan bisa mengikuti perilaku dan variasi harga per wilayah agar diperoleh nilai harga yang paling optimal. Untuk itu dibutuhkan data seluruh harga hotel di semua wilayah Makkah dan Madinah dengan kapasitas dan kepemilikan (manajemen dan investor).
- ☐ Untuk Penginapan di Embarkasi harus dibuat standar harga minimal Hotel Bintang-2 agar standar harga dan kelengkapan fasilitas bisa terukur.
- ☐ Diperlukan data yang lebih lengkap terkait data sebaran Hotel di seluruh wilayah Makkah dan Madinah dengan disertai harga, kapasitas, jarak dan nilai kasfiyah. Dengan demikian akan diperoleh angka biaya yang jauh lebih efisien.

3. Rekomendasi Terhadap Transportasi Arab Saudi

- ☐ Untuk transportasi terutama penerbangan harus memiliki data-data detail penyusun biaya penerbangan sehingga bisa dibuat ukuran yang pas dalam perhitungan biaya transportasi udara.
- ☐ Skema kontrak *multiyear* bisa dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih efisien.
- ☐ Transportasi Bus di Makkah sudah mengikuti aturan Kerajaan sehingga potensi kenaikan mengikuti inflasi.

4. Rekomendasi Terhadap Biaya Penerbangan

- ☐ Perlu adanya koreksi atas beberapa rincian biaya penerbangan agar tidak terjadi penumpukan biaya.
- ☐ Perlunya pengendali harga Avtur dengan kontrak *multiyear* Garuda Indonesia dengan Pertamina agar harga bisa diprediksi.
- ☐ Usia pesawat yang harus sesuai dengan PMA maksimal 20 tahun.

5. Rekomendasi Terhadap Biaya Pelayanan Manasik

- ☐ Perlunya pembiayaan untuk kegiatan manasik dilakukan diawal atau jauh hari menjelang musim haji agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif.
- ☐ Standar honorarium mengacu pada SBM, namun untuk pemateri bisa melibatkan Kemenag karena lebih *update* info perkembangan haji. Kendala dengan PMA yang mengatur pegawai Kemenag (PNS) tidak boleh diberi honor.
- ☐ Penyediaan alat peraga untuk optimalisasi pelaksanaan manasik haji.
- ☐ Perlu dipikirkan metode pelaksanaan manasik haji yang paling maksimal agar tidak berpatokan pada sisi kuantitas pelaksanaan tapi lebih kepada kualitas pelaksanaan serta kenyamanan peserta.

6. Rekomendasi Terhadap Kegiatan Survei Harga

- ☐ Kegiatan pembuatan standar biaya diharapkan bisa dilakukan rutin untuk mendapatkan hasil yang paling optimal sehingga seluruh biaya secara tepat mampu mengakomodir seluruh kegiatan pelayanan Haji.
- ☐ Survei harga harus mewakili semua wilayah baik di Arab Saudi maupun survei harga di Indonesia.
- ☐ Survei ke Embarkasi untuk melihat optimalisasi penggunaan anggaran penyelenggaraan ibadah haji terhadap pelayanan yang diberikan kepada Jemaah.

7. Rekomendasi Terhadap Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi

- ☐ Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi dalam hal kelengkapan dan kenyamanan sarana dan prasarana Jemaah haji dalam hal:
 1. Penyelenggaraan Manasik
 2. Penyelenggaraan pelayanan Embarkasi
 3. Penyelenggaraan akomodasi hotel
 4. Penyelenggaraan konsumsi
- ☐ Kenaikan harga yang diusulkan harus linier dengan peningkatan kualitas pelayanan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPKH] Badan Pengelola Keuangan Haji. 2018. Laporan Tahunan 2018. Jakarta (ID): BPKH.
- [BPKH] Badan Pengelola Keuangan Haji. 2019. Laporan Tahunan 2019. Jakarta (ID): BPKH.
- [BPKH] Badan Pengelola Keuangan Haji. 2020. Laporan Tahunan 2020. Jakarta (ID): BPKH.
- [BPKH] Badan Pengelola Keuangan Haji. 2021. Laporan Tahunan 2021. Jakarta (ID): BPKH.
- [BPKH] Badan Pengelola Keuangan Haji. 2022. Laporan Tahunan 2022. Jakarta (ID): BPKH.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435 Hijriah /2014 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji 1436 Hijriah /2015 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji 1437 Hijriah /2016 Masehi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Barang/Jasa Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji 1438 Hijriah /2017 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji 1439 Hijriah /2018 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji 1440 Hijriah /2019 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriah /2020 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah /2021 Masehi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuota Haji 1443 Hijriah /2022 Masehi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. (2023). Jakarta: diperbanyak oleh peraturan.bpk.go.id
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 339 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 340 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 340 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 H_2024 M dan Penggunaan Nilai Manfaat

LAMPIRAN

Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi bersama Kementerian Agama
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : Senin/12 Agustus 2024

Waktu : 08.00 – 10.00 WIB

Lokasi : Zoom Meeting, Meeting ID: 987 2979 3532, Passcode: 877415

Peserta

PT MORE : Rina Hartini
Kementerian Agama : Denny Fath

Bahasan:

1. Merinci komponen-komponen pembentuk biaya penyelenggaraan ibadah haji
2. BPKH juga disarankan berkordinasi dengan BPKH Limited di Jeddah
3. Rencana untuk melakukan rapat kordinasi dengan tim PHU-KUH untuk penjelasan kompenen biaya penyelenggaraan ibadah haji
4. tim PHU akan mendampingi tim BPKH untuk survei pasar
5. BPKH bersurat ke KUH ditujukan kepada Staf Teknis Haji KJRI
6. Untuk survei di beberapa wilayah Indonesia: Bidang haji Kantor Wilayah Jawa Barat, Makasar, Medan mewakili wilayah Provinsi dan di lokasi ini ada UPT asrama haji kecuali asrama haji di Jawa Barat ada di Bekasi dan Kantor Wilayahnya ada di Bandung.

Dokumentasi

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original

telkomsel.zoom.us

PT MORE is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Penyusunan SBM untuk BPIH BPKH

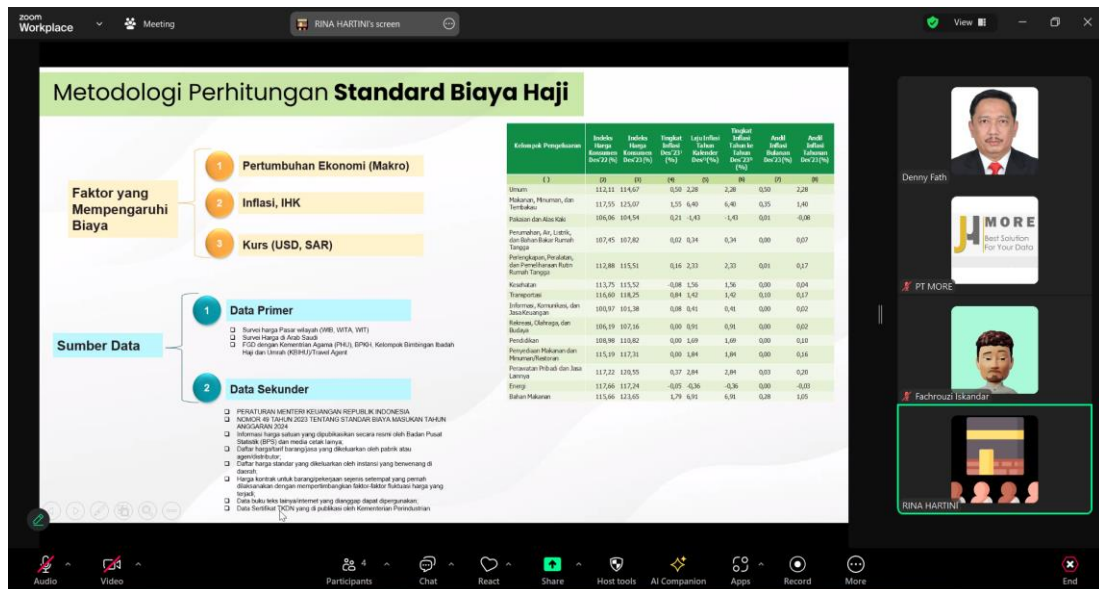
Time: Aug 12, 2024 08:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://telkomsel.zoom.us/j/98729793532?pwd=EWuQeBO5bq73xeUkuXqr5j1s9sY0oq.1>

Meeting ID: 987 2979 3532

Passcode: 877415



The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "Metodologi Perhitungan Standard Biaya Haji". The slide is divided into two main sections: "Faktor yang Mempengaruhi Biaya" and "Sumber Data".

Faktor yang Mempengaruhi Biaya:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Makro)
2. Inflasi, IHK
3. Kurs (USD, SAR)

Sumber Data:

1. Data Primer
 - Survei harga Pasar wilayah (DRI, WTA, WTI)
 - Survei harga di Kota Saudi
 - FSD dengan Kementerian Agama (PIL), EPNO, Kelompok Gendongan Rumah Haji dan Umroh (KORNU) Travel Agent
2. Data Sekunder
 - PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 - MEMORANDUM TAHUN 2023 TENTANG STANDAR DATA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024
 - Informasi harga satuan yang disediakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan media cetak lainnya
 - Daftar harga barang yang disediakan oleh publik atau pemerintah
 - Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab
 - Harga kontrak untuk barang/pekerjaan seperti setempat yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor faktor fluktuasi harga yang berlaku
 - Daftar harga barang/pekerjaan yang digunakan oleh Badan Penyelenggara
 - Data Statistik BPS yang di publikasi oleh Kementerian Perencanaan

On the right side of the screen, there is a list of participants: Denny Fath, PT MORE, and Fachrouz Iskandar. Below the list is a small video thumbnail of RINA HARTINI.

Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi bersama BPKH

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : Senin/12 Agustus 2024

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Lokasi : *online*, Microsoft Team

Peserta

PT MORE : Rina Hartini, Maya Arini
 BPKH : Seno Agung Kuncoro, Zulfi Mirza, Hikmayah Nur'aisyah, Sacha Oktafira

Bahasan:

Membuat rincian kegiatan survei di Arab Saudi dengan hasil sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1	Keberangkatan tim BPKH ke Makkah	15 Agustus 2023	Jakarta - Makkah
2	Day 1	16 Agustus 2023	
	Rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji		Jeddah
	Rapat koordinasi dengan Kantor BPKH <i>Limited</i>		Jeddah
3	Day 2	17 Agustus 2023	
	Survei harga hotel		Makkah
	Survei harga transportasi		Makkah
4	Day 3	18 Agustus 2023	
	Pelayanan pengangkutan barang Jemaah		Makkah
	Survei harga perusahaan catering		Makkah
5	Day 4	19 Agustus 2023	
	Survei harga konsumsi		Armani
	Survei harga penginapan		Armani
6	Day 5	20 Agustus 2023	
	Survei harga hotel		Madinah
	Survei harga transportasi		
7	Day 6	21 Agustus 2023	
	Survei harga konsumsi		Madinah
	Survei harga perusahaan catering		
8	Kepulangan tim BPKH Ke Indonesia	22 Agustus	Madinah - Jakarta

Dokumentasi



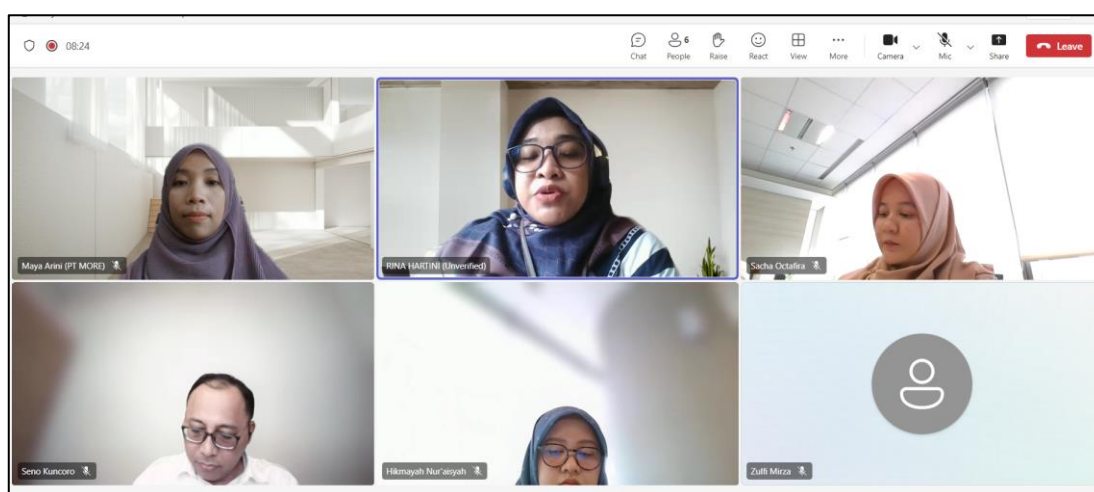
Join conversation

teams.microsoft.com

Assalamu'alaikum Bapak/Ibu, sehubungan dengan adanya kebutuhan finalisasi agenda penyusunan SBM untuk perhitungan BPIH di KSA tanggal 15-23 Agustus 2024, berikut kami sampaikan link teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDliNmQwMzgtYzhlNS00NTI4LTg1MGEtNGNmNTcxMThIZTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e9d7792-908a-4d99-9c9a-471397b662e6%22%2c%22Oid%22%3a%22539f022c-284b-4a70-85bb-685981904c01%22%7d

yang insya Allah akan dimulai pukul 14.00 WIB. Mohon berkenan untuk dapat join, terima kasih 🙏



Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi bersama PHU – KJRI Jeddah
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : Jumat/16 Agustus 2024

Waktu : 09.00 – 12.00 AM

Lokasi : Turki Bin Abdulaziz St – Al Andalous District, Jeddah, Saudi Arabia

Peserta

PT MORE : Rina Hartini
BPKH : Irwanto Abimanyu Yudodiwiryono, Seno Agung Kuncoro,
Muhammad Harris, Zulfi Mirza Mardjuki, Himawan
Sutanto Hariyadi, Hikmayah Nur'aisyah, Sacha Oktafira
PHU – KJRI Jeddah : Nasrullah Jasam, Zakaria Anshori

Bahasan:

1. Perlu mempertimbangkan faktor penentu harga:
 - ☐ Kuota
 - ☐ Fairness
 - ☐ Risiko
 - ☐ Ekonomi Makro (Kurs, Inflasi)
2. Menentukan variabel yang paling sensitif terhadap proyeksi harga kedepan
3. Penentuan HPS sangat bergantung kepada hasil Keputusan akhir DPR dalam menyetujui harga per komponen untuk biaya penyelenggaraan Haji. Setelah ditetapkan, lalu PHU melakukan justifikasi untuk HPS
4. Untuk menentukan komponen Harga ada yang bersifat *Given* (sudah ditetapkan) oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu Transportasi & Layanan Masyair. Untuk lainnya bersifat variabel (berubah) dan dapat diatur sesuai dengan Keputusan akhir DPR
5. Perlunya dibuat Standardisasi Harga Agar tidak bergantung kepada hasil Keputusan Pembahasan di DPR dengan metode *scientific* berdasarkan harga kontrak bukan dari HPS.
6. Bekerja sama dengan BPKH Limited

Dokumentasi Kegiatan Rapat bersama PHU – KJRI Jeddah



Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi bersama BPKH Limited serta Survei Harga Hotel dan Katering di Makkah

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : 18-19 Agustus 2024

Lokasi : BPKH Limited, Secondary Road 299 Ar Rusayfah, Makkah Al Mukarramah, Saudi Arabia

Peserta

PT MORE	:	Rina Hartini
BPKH	:	Irwanto Abimanyu Yudodiwiryono, Seno Agung Kuncoro, Muhammad Harris, Zulfi Mirza Mardjuki, Himawan Sutanto Hariyadi, Hikmayah Nur'aisyah, Sacha Oktafira
BPKH Limited	:	Sidiq Haryono

Bahasan:

1. BPKH Limited melakukan:
 - ☐ Penyediaan Bumbu Masak untuk seluruh katering Haji
 - ☐ Penyediaan makanan siap saji untuk 3500 Jemaah haji
 - ☐ Skenario *Land Agreement* Hotel Makkah dan Madinah (kontrak)
2. Survei Hotel Sektor 2 dan 3:
Hasil survey Hotel dan resto kondisi saat tidak di bulan Haji tutup. Hotel dan resto hanya beroperasi pada bulan haji
3. Survei Katering Aldamanhouri:
Harga Katering Indonesia sesuai (SAR 43). Harga tertinggi Nigeria (SAR 65 – dominan daging). Harga terendah Afganistan (SAR 24). Harga katering Arafah lebih tinggi SAR 2
4. Survei Hotel Al Kiswah Tower:
 - ☐ Sedang ada renovasi dua tower
 - ☐ 3 dari 5 tower disediakan untuk Jemaah haji Indonesia
 - ☐ Jarak yang dekat dengan Masjid haram membuat harga tinggi SAR 4000 – 4500 – (per bed selama di musim Haji)
 - ☐ Kenaikan harga karena inflasi di Arab Saudi. Harga diprediksi akan naik sekitar 5%-10%.
5. Survei Hotel Razana – Salah satu Hotel yang Buka di Sektor 5 (*low season*)
 - ☐ 4 Bed – SAR 160
 - ☐ 3 Bed – SAR 140
 - ☐ 2 Bed – SAR 120
 - ☐ *Full booked* Ramadhan
6. Survei Harga Makanan Resto Malaysia
 - ☐ Nasi Ayam: SAR 28

- ☐ Nasi Kambing: SAR 35
- ☐ Porsi untuk lebih dari 1 orang

Dokumentasi Peta Akomodasi Jemaah Haji Indonesia



**Dokumentasi Kondisi Hotel dan Resto yang Tutup
dan Hanya Buka saat Bulan Haji di Makkah**



Dokumentasi Survei Hotel di Makkah (Razara Al Rawoha dan Al Kiswah Towers)



Dokumentasi Survei Aldamanhouri Katering di Makkah



Dokumentasi Kegiatan Rapat bersama BPKH Limited



Minutes of Meeting

Kegiatan Survei Harga Katering di Madinah

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : Rabu/21 Agustus 2024

Lokasi : Al Madinah Al Munawwarah, Saudi Arabia

Peserta

PT MORE : Rina Hartini
BPKH : Irwanto Abimanyu Yudodiwiryono, Seno Agung Kuncoro,
Muhammad Harris, Zulfi Mirza Mardjuki, Himawan
Sutanto Hariyadi, Hikmayah Nur'aisyah, Sacha Oktafira

Bahasan:

1. Wadi Ohud Katering
 - ☐ info tahun depan akan menaikkan Harga catering dari SAR 43 bisa mencapai SAR 45-47
 - ☐ Gudang penyimpanan memiliki kapasitas 20.000
 - ☐ Ar-mina - untuk Indonesia (500 Riyal), Malaysia - (400 Riyal) -- lebih murah karena malaysia membawa makanan siap saji dari negaranya dan hanya memanaskan di Saudi.
 - ☐ Mendapatkan award pada malam penghargaan
2. Noha Katering
 - ☐ Bisnis sudah berjalan 15 Tahun
 - ☐ Melayani catering Haji dan Umroh
 - ☐ Melayani 12500 Jemaah tahun 2024
 - ☐ Harga catering haji sesuai (SAR 43)
 - ☐ Tahun 2023 SAR 28 (sarapan SAR 8, Siang SAR 10, Malam SAR 10)
 - ☐ NOHA bagian dari syarikah yang terdiri atas tiga catering besar
3. Meez Mary Katering
 - ☐ Bisnis sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun
 - ☐ Melayani catering Haji dan Umroh
 - ☐ Melayani 8000 Jemaah tahun 2024
 - ☐ Harga catering haji sesuai (SAR 43)
 - ☐ Mendapatkan peringkat pertama kepuasan atas pelayanan catering di Madinah tahun 2024 (Excelent)
4. Kontrak dengan catering dilakukan maksimal satu bulan sebelum Musim Haji, hal tersebut dilakukan karena dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pokok untuk makanan

5. Pihak *counterpart* di Arab Saudi turut memantau hasil keputusan RDP dari DPR. Harapannya penetapan bisa dilakukan jauh hari.

Dokumentasi Kegiatan Survei Harga Katering di Madinah



Dokumentasi Kegiatan Survei Harga Katering di Madinah



Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi Hasil Survei di Arab Saudi bersama BPKH **Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya** **Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

Hari/Tanggal : Selasa/27 Agustus 2024

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Lokasi : *online*, Microsoft Team

Peserta

PT MORE : Rina Hartini
BPKH : Irwanto, Seno Agung Kuncoro, Hikmayah Nur'aisyah,
Sacha Oktafira

Bahasan:

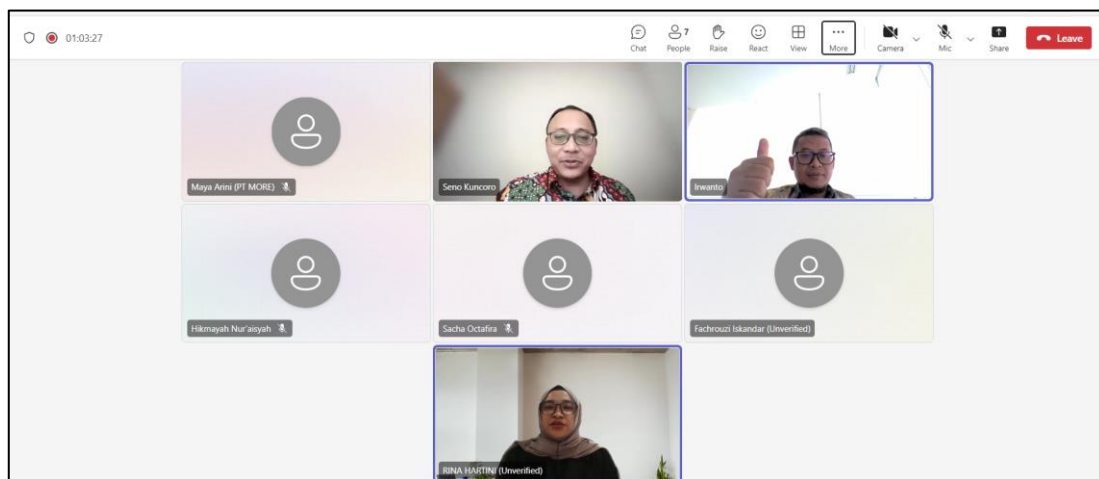
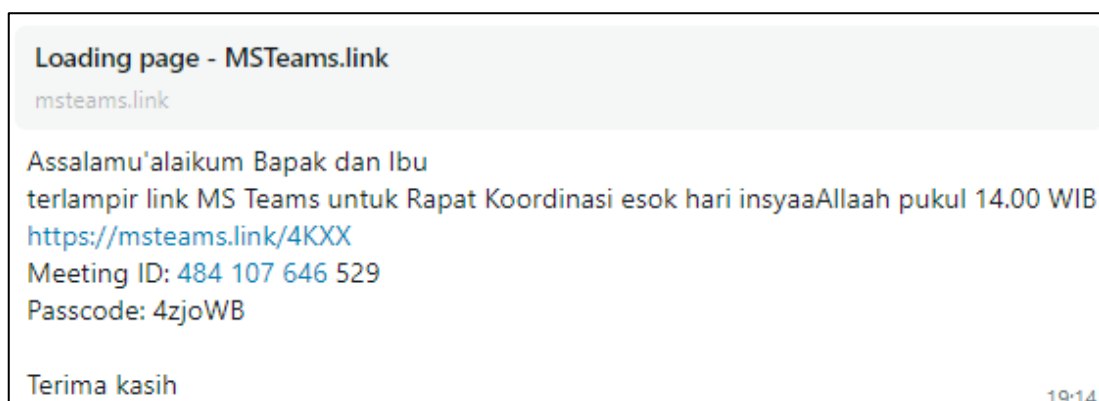
1. Berdasarkan hasil survei di Arab Saudi, variasi data harga yang diperoleh:
 - Akomodasi Makkah SAR 4230 yang terdiri dari Penginapan Makkah, dan Paket Layanan Masyair.
 - Konsumsi Makkah-Madinah SAR 43 yang terdiri dari Sarapan sebesar SAR 10, Makan siang sebesar SAR 16,5, Makan malam sebesar SAR 16,5.
 - Akomodasi Madinah sebesar SAR 1325 yaitu penginapan Madinah.
 - Layanan Masyair untuk transportasi sudah bersifat tetap dari Arab Saudi.
2. Faktor paling berperan dalam kenaikan harga setiap tahunnya adalah faktor inflasi di Arab Saudi kisaran 5% - 10%. Yang berdampak kepada kenaikan upah pekerja sehingga berpengaruh terhadap biaya akomodasi dan catering.
3. Dengan variasi harga hotel disekitaran Masjidil Haram dengan wilayah terdekat (harga lebih tinggi) wilayah yang lebih jauh (harga lebih murah) akan menentukan nilai standar dengan pendekatan model pembobotan dan simulasi dengan faktor: Harga per *bed*, kapasitas, wilayah/sektor, sebaran Jemaah haji, harga sebelumnya dan inflasi.
4. Dengan Adanya usulan Syarikat dalam penyedia penyelenggaraan Haji, bisa berdampak positif dalam hal persaingan harga, namun hal negatifnya adalah harga akan menjadi lebih tinggi karena PHU tidak berkontrak langsung dengan pihak pertama melainkan melalui Syarikat.
5. Harga Akomodasi lebih tinggi pada musim haji, karena sebagian besar penginapan dan catering hanya melayani pada musim haji saja.
6. Harga catering sesuai dengan harga Keputusan DPR dan ada potensi naik di tahun 2025 sekitar 5%-7%.
7. Harga Hotel memiliki kecenderungan naik, namun bisa diatasi dengan kombinasi variasi harga terendah dan tertinggi yang mampu menghasilkan nilai tengah yang sama atau lebih tinggi.

8. Penentuan standar harga harus menggunakan data kontrak, sehingga dari harga standar tersebut dapat dibuat nilai HPS. Dengan memasukkan seluruh faktor penentu harga.

Rekomendasi

1. BPKH Limited melakukan kontrak pada akomodasi selama beberapa tahun, sehingga PHU bisa berkontrak langsung dengan BPKH Limited dengan harga yang konstan.
2. Survei yang dilakukan saat ini tidak bertepatan dengan musim haji sehingga banyak Hotel dan resto yang tutup. Bulan Ramadhan adalah bulan yang memiliki kemiripan harga dengan musim Haji. Sehingga jika ingin melaksanakan survei lebih baik bertepatan dengan bulan Ramadhan.
3. Berkoordinasi langsung dengan PHU, yaitu direktorat yang menentukan langsung harga penyelenggaraan Haji untuk mendapatkan harga sesuai kontrak.

Dokumentasi



Minutes of Meeting

Rapat Koordinasi bersama Asosiasi Travel Haji & Umroh Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hari/Tanggal : Selasa/3 September 2024

Waktu : 16.00 – 18.00 WIB

Lokasi : GRAHA BEKA (SMC GROUP), BABUL KA'BAH, Jakarta Selatan

Peserta

PT MORE : Rina Hartini
BPKH : Seno Agung Kuncoro
SMC Group : Rini Indriani

Bahasan:

1. Informasi biaya umroh tergantung dari musim ibadah/*high season*, umumnya Desember-Januari tergolong memiliki biaya tinggi, selain itu juga pada saat Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, bulan puasa/Ramadhan memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan hari biasanya. Peningkatan biaya bisa 10%-15% pada *high season*.
2. Hotel bintang 5 umumnya rate harga sebesar SAR 1350 – SAR 1600 / room / night / 4 bed, di Makkah paling murah sebesar SAR 800 / room / night / 4 bed.
3. Transportasi 1 paket bis rate harga SAR 60.000.
4. Biaya konsumsi untuk jemaah umroh khusus memiliki rata-rata harga sebesar SAR 150.
5. Pada saat musim haji umumnya biaya akan naik 3x lipat dari biaya biasanya.

Dokumentasi

